

7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

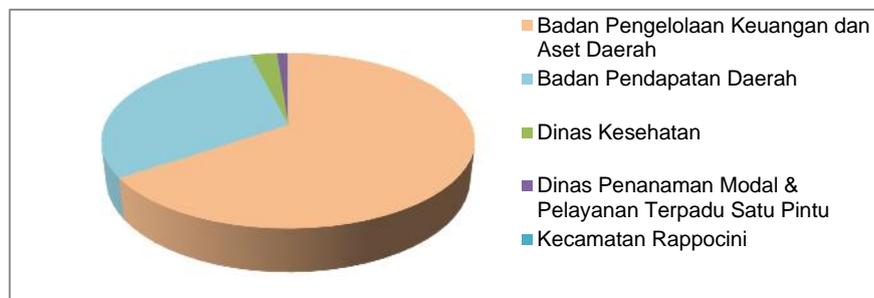
7.5.1 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran

	TA 2019	TA 2018
7.5.1.1 Pendapatan	Rp3.666.359.990.154,91	Rp3.428.479.729.162,65

Pemerintah Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2019 menganggarkan Pendapatan sebesar Rp4.055.576.463.716,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.624.776.235.586,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.274.310.628.130,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp156.489.600.000,00. Dari target tersebut Pendapatan Kota Makassar telah direalisasikan sebesar Rp3.666.359.990.154,91 atau sebesar 90,40%. Pencapaian target Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.303.316.337.553,94, Pendapatan Transfer Rp2.212.978.024.448,97 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp150.065.628.152,00.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan realisasi pendapatan tertinggi yaitu sebesar Rp2.284.198.329.114,55 atau 92,01% dari total realisasi Pendapatan TA. 2019. Kecamatan Ujung Tanah merupakan OPD dengan realisasi pendapatan terendah yaitu sebesar Rp380.827.000,00. OPD dengan realisasi pendapatan TA 2019 disajikan dalam diagram berikut.

Gambar 1 Diagram OPD dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi TA 2019



	TA 2019	TA 2018
7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Rp1.303.316.337.553,94	Rp1.185.453.010.989,65

Nilai tersebut merupakan pendapatan murni yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya yang berasal dari Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 sebesar 80,22% dari jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.624.776.235.586,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,94% atau Rp117.863.326.564,29 dari realisasi TA 2018 yang mencapai nilai sebesar Rp1.185.453.010.989,65. Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar meliputi:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.1.1.1 Pajak Daerah

TA 2019	TA 2018
Rp1.067.323.035.833,80	Rp942.551.891.961,00

Realisasi Pajak Daerah TA 2019 sebesar Rp1.067.323.035.833,80 atau 81,17% dari target sebesar Rp 1.315.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, realisasi Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp124.771.143.872,80 atau 13,24% dari realisasi Tahun 2018 yang mencapai nilai realisasi sebesar Rp942.551.891.961,00.

Realisasi Jenis Pajak Daerah yang dipungut Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selama Tahun Anggaran 2018 meliputi:

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019

Jenis pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Hotel	135.000.000.000,00	120.487.321.552,80	89,25
Pajak Restoran	185.000.000.000,00	210.329.363.125,00	113,69
Pajak Hiburan	77.000.000.000,00	40.227.621.280,00	52,24
Pajak Reklame	53.000.000.000,00	53.641.688.525,00	101,21
Pajak Penerangan Jalan	250.000.000.000,00	222.267.797.099,00	88,91
Pajak Pengambilan Tambang Galian Gol. C	2.000.000.000,00	0,00	0,00
Pajak Parkir	60.750.000.000,00	20.073.510.111,00	33,04
Pajak Air Bawah Tanah	7.000.000.000,00	3.873.728.024,00	55,34
Pajak Sarang Burung Walet	250.000.000,00	33.713.400,00	13,49
Pajak BPHTB	330.000.000.000,00	232.812.018.732,00	70,55
Pajak Bumi dan Bangunan Sek. P2	215.000.000.000,00	163.576.273.985,00	76,08
Jumlah	1.315.000.000.000,00	1.067.323.035.833,80	81,17

Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp222.267.797.099,00 terdiri atas PPJ PLN sebesar Rp222.232.990.782,00 dan PPJ Non PLN sebesar Rp34.806.317,00.

7.5.1.1.2 Retribusi Daerah

TA 2019	TA 2018
Rp68.097.361.544,56	Rp57.277.225.805,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2019 sebesar Rp68.097.361.544,56 atau mencapai 51,45% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp132.348.780.000,00. Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2018 nilai tersebut mengalami peningkatan 18,89% atau sebesar Rp10.820.135.739,56 dari jumlah realisasi Tahun 2018 yang mencapai Rp57.277.225.805,00. Jenis retribusi yang memberikan kontribusi terbesar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang mencapai 49,05% dari total Retribusi Daerah.

Realisasi Jenis Retribusi yang dipungut Pemerintah Kota Makassar selama Tahun Anggaran 2019 meliputi:

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2019

Jenis Retribusi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.262.790.000,00	1.666.298.300,00	51,07
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	20.050.000.000,00	18.252.930.000,00	91,04
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	560.000.000,00	595.350.000,00	106,31
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.414.990.000,00	1.539.892.350,00	63,76
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	500.000.000,00	564.501.500,00	112,90
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	519.000.000,00	360.670.000,00	69,49
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	27.475.000.000,00	8.247.881.985,56	30,02
Retribusi Tempat Pelelangan	1.540.000.000,00	1.466.181.000,00	95,21
Retribusi Penyeberangan di Air	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	75.000.000.000,00	33.403.802.709,00	44,54
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	800.000.000,00	1.305.000.000,00	163,13
Retribusi Izin Trayek	177.000.000,00	44.169.800,00	24,95
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	0,00	600.683.900,00	100,00
Jumlah	132.348.780.000,00	68.097.361.544,56	51,45

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	TA 2019	TA 2018
	Rp18.225.557.959,00	Rp49.463.120.625,29

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 merupakan bagi hasil atas penyertaan modal/deviden yang terealisasi sebesar Rp18.225.557.959,00 atau 48,20% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp37.809.786.683,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2018 nilai tersebut mengalami penurunan 63,15% atau sebesar Rp31.237.562.666,29 dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp49.463.120.625,29. Pendapatan ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Realisasi Bagi hasil atas Penyertaan Modal dapat dilihat dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 14 Realisasi Bagi Hasil TA 2019 dan 2018

Nama Perusahaan	Nilai Bagi Hasil TA 2019 (Rp)	Nilai Bagi Hasil TA 2018 (Rp)	Trend %
Perusahaan Daerah			
PDAM	9.920.229.777,00	41.591.065.653,50	(76,14)
BPR	0,00	0,00	0,00
PD. Pasar Makassar Raya	802.874.497,00	256.025.000,00	213,59
PD. RPH	0,00	0,00	0,00
PD. Parkir	762.993.082,00	1.093.581.936,79	(30,22)
PD. Terminal	0,00	0,00	0,00
Perusahaan Pemerintah			
PT. Bank SULSEL	6.367.217.139,00	6.246.770.479,00	1,92
PT. Kima Makassar	240.243.464,00	170.077.556,00	41,25
Perusahaan Swasta			
PT. GMTD	132.000.000,00	105.600.000,00	25,00
Jumlah	18.225.557.959,00	49.463.120.625,29	(63,15)

**7.5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah**

	TA 2019	TA 2018
	Rp149.670.382.216,58	Rp136.160.772.598,36

Merupakan pendapatan daerah yang sah diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan BLUD, pendapatan UPTD, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, dana kapitasi JKN pada FKTP dan hasil penerimaan pihak ketiga . Nilai tersebut direalisasikan sebesar Rp149.670.382.216,58 atau 107,20% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp139.617.668.903,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018, nilai tersebut mengalami peningkatan 9,92% atau sebesar Rp13.509.609.618,22 dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp136.160.772.598,36.

Tabel 15 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.364.244.000,00	1.174.538.353,00	86,09
Penerimaan Jasa Giro	6.500.000.000,00	10.960.634.284,00	168,63
Pendapatan Bunga deposito	10.000.000.000,00	10.602.739.712,00	106,03
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.038.184.622,00	8.920.303.573,84	177,05
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.844.583.490,00	8.689.141.819,92	179,36



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Dari Pengembalian	9.160.000.000,00	11.771.713.316,82	128,51
Lain-lain PAD yang sah lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	69.821.040.791,00	68.377.098.977,00	97,93
Pendapatan UPTD Bank Sampah	3.000.000.000,00	1.008.047.630,00	33,6
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	29.849.616.000,00	28.166.164.550,00	94,36
Jumlah	139.617.668.903,00	149.670.382.216,58	107,20

7.5.1.1.2 **Pendapatan Transfer**

TA 2019	TA 2018
Rp2.212.978.024.448,97	Rp2.098.135.622.513,00

Pendapatan Transfer TA 2019 sebesar Rp2.212.978.024.448,97 merupakan realisasi transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar 97,30% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.274.310.628.130,00. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, nilai ini mengalami peningkatan 5,47% atau sebesar Rp 114.842.401.935,97 dari jumlah realisasi tahun 2018 yang mencapai nilai sebesar Rp2.098.135.622.513,00. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 16 Realisasi Pendapatan Transfer TA 2019

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.905.309.925.464,00	1.824.567.795.448,00	95,76
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	31.415.999.000,00	31.415.999.000,00	100,00
Transfer Pemerintah Propinsi	337.584.703.666,00	356.994.230.000,97	105,75
Jumlah	2.274.310.628.130,00	2.212.978.024.448,97	97,30

7.5.1.1.2.1 **Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan**

TA 2019	TA 2018
Rp 1.824.567.795.448,00	Rp1.808.260.589.494,00

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2019 sebesar Rp1.824.567.795.448,00 merupakan realisasi transfer dari pemerintah pusat selama TA 2019 yang mencapai 95,76% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.905.309.925.464,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 nilai tersebut mengalami peningkatan 0,90% atau sebesar Rp16.307.205.954,00 dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2018 yang mencapai nilai sebesar Rp1.808.260.589.494,00, dengan rincian Dana Perimbangan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

a. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak dari Pusat mencapai nilai Rp73.049.789.863,00 atau sebesar 70,08% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp104.237.373.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2018 maka nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 29,02% atau sebesar Rp29.863.775.762, dari jumlah yang dicapai selama Tahun 2018 sebesar Rp102.913.565.625,00.

Secara lebih rinci dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 17 Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2019

Bagi Hasil Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	7.698.807.000,00	5.830.596.597,00	75,73
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	96.538.566.000,00	67.219.193.266,00	69,63
Jumlah	104.237.373.000,00	73.049.789.863,00	70,08

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dana tersebut telah direalisasikan sebesar Rp4.623.235.530,00, atau sebesar 63,02% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.335.891.000,00 Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,87% atau sebesar Rp256.450.650,00 dari jumlah yang terealisasi selama Tahun 2018 sebesar Rp4.366.784.880,00. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dapat dirinci dalam tabel berikut.

**Tabel 18 Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam TA 2019**

Jenis Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	29.764.000,00	17.858.400,00	60,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	3.584.694.000,00	2.509.285.800,00	70,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	0,00	123.530,00	100,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	2.737.840.000,00	1.505.812.000,00	55,00
Jumlah	7.335.891.000,00	4.623.235.530,00	63,02

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum selama Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp1.379.148.200.000,00 atau 98,08% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.406.148.187.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,12% atau sebesar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rp79.593.878.308 dari realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2018 sebesar Rp1.299.554.321.692,00.

d. Dana Alokasi Khusus

Dana ini direalisasikan sebesar Rp367.746.570.055,00 atau 94,88% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp387.588.474.464,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, realisasi Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 8,39% atau sebesar Rp33.679.347.242 dari realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 sebesar Rp401.425.917.297,00.

		TA 2019	TA 2018
7.5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer		
	Pemerintah Pusat Lainnya	Rp31.415.999.000,00	Rp17.875.000.000,00

Nilai tersebut merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. Dana ini direalisasikan sebesar Rp 31.415.999.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp31.415.999.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 75,75% atau sebesar Rp13.540.999.000 dari realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 sebesar Rp17.875.000.000,00.

		TA 2019	TA 2018
7.5.1.1.2.3	Pendapatan Transfer		
	Pemerintah Provinsi	Rp356.994.230.000,97	Rp272.000.033.019,00

Nilai tersebut merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Nilai tersebut tercapai sebesar Rp356.994.230.000,97 atau 105,75% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp337.584.703.666,00 Realisasi transfer Pemerintah Provinsi selama Tahun 2019 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 19 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2019

Jenis Penerimaan Bagi Hasil Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pajak Kendaraan Bermotor	141.647.241.666,00	139.337.978.287,00	98,37
BBN Kendaraan Bermotor	77.000.000.000,00	79.389.816.046,00	103,10
Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	78.000.000.000,00	86.444.758.920,00	110,83
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT/AP	700.000.000,00	953.981.109,00	136,28
Pajak Cukai Hasil Tembakau	237.462.000,00	237.685.691,00	100,09
Pajak Rokok	40.000.000.000,00	50.630.009.947,97	126,58
Jumlah	337.584.703.666,00	356.994.230.000,97	105,75



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 maka nilai ini mengalami peningkatan 31,25% atau sebesar Rp84.994.196.981,97 dari jumlah realisasi Tahun 2018 sebesar Rp272.000.033.019,00.

Lain-Lain	TA 2019	TA 2018
7.5.1.1.3 Pendapatan Daerah yang Sah	Rp150.065.628.152,00	Rp144.891.095.660,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp150.065.628.152,00 atau 95,89% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp156.489.600.000,00. Nilai ini mengalami peningkatan 3,57% atau sebesar Rp5.174.532.492,00 dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp144.891.095.660,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

	TA 2019	TA 2018
7.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	Rp132.401.628.152,00	Rp128.588.743.987,00

Pendapatan Hibah Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp132.401.628.152,00 atau 95,37 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp138.825.600.000,00. Nilai ini mengalami peningkatan 2,97% atau sebesar Rp3.812.884.165,00 dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp128.588.743.987,00. Pendapatan Hibah merupakan pendapatan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

	TA 2019	TA 2018
7.5.1.1.3.2 Bantuan Keuangan	Rp0,00	Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2019, Bantuan Keuangan tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan, dan tidak terealisasi sampai dengan akhir Desember 2019.

	TA 2019	TA 2018
7.5.1.1.3.3 Pendapatan Lainnya	Rp17.664.000.000,00	Rp16.302.351.673,00

Pendapatan Lainnya untuk Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp17.664.000.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp17.664.000.000,00. Nilai ini mengalami peningkatan 8,35% atau sebesar Rp1.361.648.327,00 dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp16.302.351.673,00. Pendapatan lainnya Tahun Anggaran 2019 berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas Dana Kesehatan Gratis sebesar Rp17.664.000.000,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.1.2 Belanja

TA 2019	TA 2018
Rp3.548.006.636.749,30	Rp3.522.986.464.897,09

Pada Tahun Anggaran 2019 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp4.176.183.531.400,91 sampai dengan pelaksanaan akhir Tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp3.548.006.636.749,30 atau 84,96 %. Realisasi Belanja TA 2019 mengalami peningkatan 0,71% atau sebesar Rp25.020.171.852,21 dibandingkan realisasi Belanja TA 2018 sebesar Rp3.522.986.464.897,09.

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

TA 2019	TA 2018
Rp2.663.769.704.066,50	Rp2.776.033.750.162,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.663.769.704.066,50 atau 88,06% dari rencana Belanja Tahun 2019 sebesar Rp3.024.805.711.330,00. Nilai ini mengalami penurunan 4,04% atau sebesar Rp112.264.046.095,50 dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp2.776.033.750.162,00. Belanja Operasi terdiri dari:

Tabel 20 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Jenis Belanja Operasi	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
Belanja Pegawai	1.212.306.922.225,00	1.208.192.744.067,00
Belanja Barang	1.393.040.321.841,50	1.430.119.739.515,00
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	55.552.460.000,00	137.256.266.580,00
Belanja Bantuan Sosial	2.870.000.000,00	465.000.000,00
Jumlah	2.663.769.704.066,50	2.776.033.750.162,00

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

TA 2019	TA 2018
Rp1.212.306.922.225,00	Rp1.208.192.744.067,00

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp1.325.927.751.532,00 dan terealisasi sebesar Rp1.212.306.922.225,00 atau 91,43%. Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan 0,34% atau sebesar Rp4.114.178.158,00 dari realisasi Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp1.208.192.744.067,00. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019

No	Kelompok Belanja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Rasio %	Realisasi 2018 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	1.036.454.910.949,00	971.818.886.353,00	64.636.024.596,00	93,76	939.130.898.242,00
2	Belanja Honor Pegawai	188.141.175.500,00	167.434.048.500,00	20.707.127.000,00	88,99	191.872.882.578,00
3	Tambahan Penghasilan PNS	1.647.000,00	365.400,00	1.281.600,00	22,19	1.339.800,00
4	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	11.320.000.000,00	10.646.615.000,00	673.385.000,00	94,05	10.674.592.500,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Kelompok Belanja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Rasio %	Realisasi 2018 (Rp)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.009.087.000,00	1.326.500.000,00	3.682.587.000,00	26,48	1.243.549.210,00
6	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	53.572.500.000,00	32.900.734.190,00	20.671.765.810,00	61,41	33.890.578.215,00
7	Belanja Pegawai Dana BOS	2.437.603.915,00	1.433.147.442,00	1.004.456.473,00	58,79	6.936.899.967,00
8	Belanja Pegawai BLUD	28.990.827.168,00	26.746.625.340,00	2.244.201.828,00	92,26	24.442.003.555,00
	JUMLAH	1.325.927.751.532,00	1.212.306.922.225,00	113.620.829.307,00	91,43	1.208.192.744.067,00

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang

TA 2019	TA 2018
Rp1.393.040.321.841,50	Rp1.430.119.739.515,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 mencapai 85,35% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.632.090.986.253,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2018 nilai tersebut mengalami penurunan 2,59% atau sebesar Rp37.079.417.673,50 dari jumlah realisasi Tahun 2018 yang mencapai Rp1.430.119.739.515,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2019

No	Kelompok Belanja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Rasio %	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Bahan Habis Pakai	107.237.351.671,00	91.034.631.342,00	16.202.720.329,00	84,89	96.474.382.072,00
2	Belanja Bahan/Material	61.001.186.151,00	51.935.933.857,00	9.065.252.294,00	85,14	48.437.673.673,00
3	Belanja Jasa Kantor	714.165.852.404,00	626.112.332.979,00	88.053.519.425,00	87,67	648.030.785.502,00
4	Belanja Premi Asuransi	72.789.413.016,00	67.911.291.726,00	4.878.121.290,00	93,30	41.702.221.596,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96.890.330.444,00	75.063.383.092,50	21.826.947.351,50	77,47	74.175.916.475,00
6	Belanja cetak dan Penggandaan	41.574.431.064,00	33.361.473.673,00	8.212.957.391,00	80,25	43.243.200.528,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir	6.886.767.404,00	5.247.424.367,00	1.639.343.037,00	76,20	6.454.252.959,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	961.700.000,00	769.808.617,00	191.891.383,00	80,05	731.093.540,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.036.394.600,00	18.290.465.380,00	1.745.929.220,00	91,29	24.690.505.750,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	120.611.757.758,00	100.470.752.317,00	20.141.005.441,00	83,30	130.926.169.871,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.942.790.000,00	8.478.774.000,00	1.464.016.000,00	85,28	6.613.729.600,00
13	Belanja Pakaian Kerja	8.455.628.000,00	7.414.175.400,00	1.041.452.600,00	87,68	8.037.002.550,00
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari	6.760.125.000,00	5.370.573.000,00	1.389.552.000,00	79,44	8.462.128.300,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	96.632.543.396,00	73.108.354.905,00	23.524.188.491,00	75,66	80.847.385.191,00
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	250.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	80,00	200.000.000,00
17	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	13.976.985.000,00	10.038.753.302,00	3.938.231.698,00	71,82	6.106.497.950,00
18	Belanja Pemeliharaan	28.411.721.776,00	20.496.064.553,00	7.915.657.223,00	72,14	21.787.229.630,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Kelompok Belanja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Rasio %	Realisasi 2018 (Rp)
19	Belanja Jasa Konsultasi	16.010.213.215,00	10.263.203.855,00	5.747.009.360,00	64,10	14.374.714.500,00
20	Belanja Barang yang akan dijual Kepada Masyarakat	1.066.500.000,00	852.000.000,00	214.500.000,00	79,89	509.272.500,00
21	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.131.237.700,00	11.455.483.877,00	10.675.753.823,00	51,76	1.964.954.816,00
22	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900.000,00
23	Belanja Bantuan Sosial yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	3.342.650.000,00	2.567.900.000,00	774.750.000,00	76,82	30.618.700,00
24	Belanja Barang dan Jasa Dana Kesehatan Gratis	5.482.590.804,00	5.320.454.805,00	162.135.999,00	97,04	5.088.061.428,00
25	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasi Kesehatan	27.552.400.000,00	24.781.170.800,00	2.771.229.200,00	89,94	23.339.758.400,00
26	Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	13.163.573.415,00	10.378.856.825,00	2.784.716.590,00	78,85	10.819.625.957,00
27	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	92.876.641.734,00	90.497.071.575,00	2.379.570.159,00	97,44	89.795.270.763,00
28	Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.880.201.701,00	41.619.987.594,00	2.260.214.107,00	94,85	34.812.087.264,00
JUMLAH		1.632.090.986.253,00	1.393.040.321.841,50	239.224.016.011,50	85,34	1.430.119.739.515,00

7.5.1.2.1.3 Belanja Bunga

TA 2019	TA 2018
Rp0,00	Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2019, Belanja Bunga tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan, dan tidak terealisasi sampai dengan akhir Desember 2019.

7.5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

TA 2019	TA 2018
Rp0,00	Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2019, Belanja Subsidi tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan, dan tidak terealisasi sampai dengan akhir Desember 2019.

7.5.1.2.1.5 Belanja Hibah

TA 2019	TA 2018
Rp55.552.460.000,00	Rp137.256.266.580,00

Belanja Hibah Pemerintah Kota Makassar TA 2019 dianggarkan pada PPKD dan OPD sebesar Rp63.671.973.545,00 yang direalisasikan sebesar Rp55.552.460.000,00 atau 87,25%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2018 Realisasi Belanja Hibah mengalami penurunan 59,53% atau sebesar Rp81.703.806.580,00 dari realisasi TA 2018 sebesar Rp137.256.266.580,00.

Hibah tersebut terdiri dari realisasi Belanja Hibah berupa uang dan berupa barang. Belanja Hibah berupa uang antara lain Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi, Belanja Hibah kepada masyarakat/perorangan dan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

belanja Bantuan Operasional PAUD. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah berupa uang dan barang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2019

No	Jenis Belanja Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %
1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	41.308.473.545,00	37.486.960.000,00	90,75
2	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	6.755.000.000,00	5.905.000.000,00	87,42
3	BOP PAUD Masyarakat	11.581.200.000,00	9.549.000.000,00	82,45
4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	4.027.300.000,00	2.611.500.000,00	64,84
Jumlah		63.671.973.545,00	55.552.460.000,00	87,25

7.5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

TA 2019	TA 2018
Rp2.870.000.000,00	Rp465.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Makassar TA 2019 dianggarkan sebesar Rp3.115.000.000,00 yang direalisasikan sebesar Rp2.870.000.000,00 atau 92,13% Apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2018 Realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami peningkatan 517,20% atau sebesar Rp2.405.000.000 dari realisasi TA 2018 sebesar Rp 465.000.000,00.

7.5.1.2.2 Belanja Modal

TA 2019	TA 2018
Rp884.202.784.682,80	Rp 746.832.060.455,09

Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp1.119.500.011.164,00 dan terealisasi sebesar Rp884.202.784.682,80 atau 78,98%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal TA 2018 Realisasi Belanja Modal mengalami peningkatan 18,39% atau sebesar Rp137.370.724.227,71 dari realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp746.832.060.455,09 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 24 Belanja Modal TA 2019 dan 2018

Jenis Belanja Modal	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
Belanja Tanah	1.234.902.530,00	1.287.268.520,00
Belanja Peralatan dan Mesin	268.978.239.337,00	148.311.772.459,00
Belanja Gedung dan Bangunan	171.879.634.304,00	148.354.692.939,00
Belanja Jalan Irigasi, dan Jaringan	416.511.780.032,80	412.524.720.881,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	24.613.620.479,00	32.061.129.098,09
Belanja Aset Lainnya	984.608.000,00	4.292.476.558,00
Jumlah	884.202.784.682,80	746.832.060.455,09



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Belanja Tanah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp2.455.170.500,00 dan

7.5.1.2.2.1 Belanja Tanah

TA 2019	TA 2018
Rp1.234.902.530,00	Rp1.287.268.520,00

terrealisasi sebesar Rp1.234.902.530,00 atau 50,30%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.220.267.970,00 atau 49,70%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tanah TA 2018 Realisasi Belanja Tanah pada TA 2019 mengalami penurunan 4,07% atau sebesar Rp52.365.990 dibandingkan realisasi Belanja Tanah TA 2018 sebesar Rp1.287.268.520,00.

Tabel 25 Belanja Tanah TA 2019 dan 2018

Jenis Belanja	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	951.834.300,00	975.983.200,00
Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya	283.068.230,00	311.285.320,00
Jumlah	1.234.902.530,00	1.287.268.520,00

7.5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

TA 2019	TA 2018
Rp268.978.239.337,00	Rp148.311.772.459,00

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp331.373.809.733,00 dan terealisasi sebesar Rp268.978.239.337,00 atau 81,17%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp62.395.570.396,00 atau 18,83%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tanah TA 2018. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan 81,36% atau sebesar Rp 120.666.466.878,00 dari realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2018 sebesar Rp148.311.772.459,00.

Tabel 26 Belanja Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018

Jenis Belanja	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	38.177.194.000,00	27.843.487.050,00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	49.518.572.100,00	37.937.127.552,00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	160.964.000,00	296.025.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	554.250.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tidak Bermotor	0,00	110.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	1.271.852.520,00	2.930.783.750,00
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Perikanan, Pertanian dan Peternakan	155.900.000,00	43.475.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	5.021.380.800,00	311.110.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	58.500.000,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Jenis Belanja	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Komputer	23.176.933.398,00	15.695.402.236,00
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.215.537.638,00	1.616.268.340,00
Belanja Modal Perlengkapan Kantor	5.467.152.114,00	6.815.192.950,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeleur	9.318.113.100,00	6.387.831.628,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	928.098.683,00	1.308.537.300,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	648.951.866,00	663.904.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	8.878.278.700,00	9.984.516.568,00
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	1.220.984.940,00	1.263.844.500,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	74.941.013.989,00	11.159.918.027,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	7.283.951.677,00	188.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	26.174.618.887,00	20.818.775.500,00
Belanja Modal BLUD	0,00	571.837.558,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan rumah Tangga	253.829.400,00	304.126.000,00
Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	847.589.811,00	844.119.500,00
Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame	1.697.038.300,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Plat Himbauan	232.323.000,00	604.240.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.387.960.414,00	0,00
Jumlah	268.978.239.337,00	148.311.772.459,00

7.5.1.2.2.3 **Belanja Gedung dan Bangunan**

TA 2019	TA 2018
Rp171.879.634.304,00	Rp148.354.692.939,00

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp242.554.103.887,00 dan terealisasi sebesar Rp171.879.634.304,00 atau 70,86%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp70.674.469.583,00 atau 29,14%. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami peningkatan 15,86% atau sebesar Rp23.524.941.365 dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 sebesar Rp148.354.692.939,00.

Tabel 27 Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018

Jenis Belanja	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	162.274.373.400,00	142.371.906.551,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Jenis Belanja	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	316.579.000,00	321.488.823,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat berjualan	45.925.000,00	780.859.500,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi pertanian	0,00	78.818.000,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi peternakan	0,00	65.950.000,00
Belanja modal Pengadaan bangunan tidak permanen	1.238.832.380,00	856.662.500,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi areal pemakaman	167.310.811,00	483.720.898,00
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Patok tanah/wilayah	358.753.850,00	373.220.617,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana dan Prasarana Olahraga	4.359.389.500,00	2.635.638.050,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman dan Jalur	48.500.000,00	386.428.000,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi sarana dan prasarana kepariwisataan	1.614.323.500,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	1.455.646.863,00	0,00
Jumlah	171.879.634.304,00	148.354.692.939,00

7.5.1.2.2.4 **Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

TA 2019	TA 2018
Rp416.511.780.032,80	Rp412.524.720.881,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp513.734.790.371,00 dan terealisasi sebesar Rp416.511.780.032,80 atau 81,08%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp97.223.010.338,20 atau 18,92%. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 mengalami kenaikan 0,97% atau sebesar Rp3.987.059.151,80 dibandingkan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 sebesar Rp412.524.720.881,00.

Tabel 28 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 dan 2018

Jenis Belanja	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Jalan	326.708.451.468,00	316.222.748.325,00
Belanja modal Pengadaan Jembatan	2.437.048.940,00	2.692.357.060,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	87.324.644.624,80	89.115.185.436,00
Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	770.256.060,00
Belanja modal Pengadaan Jalan, Taman	41.635.000,00	3.724.174.000,00
Jumlah	416.511.780.032,80	412.524.720.881,00

7.5.1.2.2.5 **Belanja Aset Tetap Lainnya**

TA 2019	TA 2018
Rp24.613.620.479,00	Rp32.061.129.098,09



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp27.876.635.874,00 terealisasi sebesar Rp24.613.620.479,00 atau 88,29%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.263.015.395,00 atau 11,71%. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 mengalami penurunan 23,23% atau sebesar Rp7.447.508.619,09 dibandingkan Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 sebesar Rp32.061.129.098,09.

Tabel 29 Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019 dan 2018

Jenis Belanja	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Buku	518.891.260,00	540.544.000,00
Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	2.944.698.550,00	62.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	0,00	0,00
Belanja Modal BLUD	1.722.556.673,00	0,00
Belanja Modal Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	690.365.000,00	0,00
Belanja Modal Dana BOS	18.737.108.996,00	31.458.585.098,09
Jumlah	24.613.620.479,00	32.061.129.098,09

7.5.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

TA 2019	TA 2018
Rp984.608.000,00	Rp4.292.476.558,00

Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp1.505.500.799,00 terealisasi sebesar Rp984.608.000,00 atau 65,40%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp520.892.799,00 atau 34,60%. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019 mengalami penurunan 77,06% atau sebesar Rp3.307.868.558 dibandingkan Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 sebesar Rp4.292.476.558,00. Belanja Aset lainnya merupakan Belanja Aset Tak Berwujud antara lain berupa Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM), Aplikasi Berbasis *Website* dan *Mobile*, SIM BLUD, dan Software Integrasi CCTV.

7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

TA 2019	TA 2018
Rp34.148.000,00	Rp120.654.280,00

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp31.877.808.906,91 terealisasi sebesar Rp34.148.000,00 atau 0,11%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp31.843.660.906,91 atau 99,89%. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2019 mengalami penurunan 71,70% atau sebesar Rp86.506.280,00 dibandingkan Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 sebesar Rp120.654.280,00. Belanja Tidak Terduga tahun 2019 merupakan terdiri atas:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 30 Belanja Tidak Terduga TA 2019

NO	URAIAN	NAMA PENERIMA	JUMLAH
1	Pengembalian Kelebihan Pendapatan Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	34.148.000,00
	Jumlah		34.148.000,00

7.5.1.3 Transfer

TA 2019	TA 2018
Rp1.116.584.000,00	Rp3.094.538.000,00

Transfer Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp1.149.948.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.116.584.000,00 atau 97,10%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp33.364.000,00 atau 2,90%. Realisasi Transfer mengalami penurunan dari realisasi Transfer TA 2018 sebesar Rp1.977.954.000,00 atau 63,92% dibandingkan Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 sebesar Rp3.094.538.000,00. Belanja transfer sendiri terdiri atas transfer bantuan keuangan.

7.5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Ke Kelurahan

TA 2019	TA2018
Rp0,00	Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2019, transfer bagi hasil ke kelurahan tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terealisasi sampai dengan akhir Desember 2019.

7.5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

TA 2019	TA 2018
Rp1.116.584.000,00	Rp3.094.538.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp1.149.948.000,00 terealisasi sebesar Rp1.116.584.000,00 atau 97,10%. Belanja Bantuan Keuangan diperuntukkan sebagai bantuan kepada Provinsi dan Partai Politik. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %
1	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	151.437.000,00	151.437.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %
2	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	100.894.000,00	100.894.000,00	100,00
3	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	92.448.000,00	92.448.000,00	100,00
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	85.916.000,00	85.916.000,00	100,00
5	Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan	96.978.000,00	96.978.000,00	100,00
6	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	153.388.000,00	153.388.000,00	100,00
8	Belanja bantuan Kepada Partai Hanura	83.567.000,00	83.567.000,00	100,00
9	Belanja bantuan Kepada Partai Gerindra	131.330.000,00	131.330.000,00	100,00
11	Belanja bantuan Kepada Partai Bulan Bintang	25.749.000,00	25.749.000,00	100,00
14	Belanja bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	130.699.000,00	130.699.000,00	100,00
15	Belanja bantuan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	44.937.000,00	29.980.000,00	66,72
16	Belanja bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	18.867.000,00	18.867.000,00	100,00
17	Belanja bantuan Kepada Partai Berkarya	15.331.000,00	15.331.000,00	100,00
18	Belanja bantuan Kepada Partai Persatuan Indonesia	18.407.000,00	0	0,00
Jumlah		1.149.948.000,00	1.116.584.000,00	97,10

7.5.1.3 **Pembiayaan**

TA 2019	TA 2018
Rp121.757.265.684,91	272.358.289.419,35

Dalam Tahun Anggaran 2019, Pembiayaan Netto direncanakan sebesar Rp121.757.015.684,91, dan terealisasi sebesar Rp121.757.265.684,91 atau 100%. Pos pembiayaan daerah yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

7.5.1.3.1 **Penerimaan Pembiayaan**

TA 2019	TA 2018
Rp174.757.265.684,91	Rp272.358.289.419,35

Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp174.757.015.684,91 dapat direalisasi sebesar Rp174.757.265.684,91 atau 100% terdapat selisih kurang Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp250.000,00.

Kelompok Penerimaan Pembiayaan dibagi menurut jenis Penerimaan Pembiayaan yang terdiri atas:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dianggarkan sebesar Rp174.757.015.684,91 dan terealisasi sebesar Rp174.757.015.684,91 atau 100%.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- b. Penerimaan Piutang Daerah tidak dianggarkan namun dapat terealisasi sebesar Rp250.000,00.

7.5.1.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	TA 2019	TA 2018
		Rp 53.000.000.000,00	Rp0,00

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp53.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp53.000.000.000,00 atau 100%. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

7.5.1.3.3	SILPA	TA 2019	TA 2018
		Rp238.994.035.090,52	Rp174.757.015.684,91

Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp238.994.035.090,52 mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp64.237.019.405,61 atau sebanyak 36,76%. Silpa tersebut terdiri dari:

Tabel 32 Rincian Silpa TA 2019

No	Uraian	Nilai
1	Kas di Kas Daerah	222.096.474.878,19
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.091.229.858,00
3	Kas di BOS	8.948.189.544,33
4	Kas FKTP/JKN (27 PUSKESMAS)	1.507.133.476,00
5	KAS di BLUD (19 PUSKESMAS)	2.676.620.301,00
6	Kas di BLUD (RSUD DAYA)	2.674.387.033,00
Jumlah		238.994.035.090,52



7.5.2 Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2019 adalah sebesar Rp174.757.015.684,91.

7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2019 Penggunaan SAL merupakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp174.757.015.684,91.

7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 adalah sebesar Rp238.994.035.090,52.

a. Surplus/Defisit – LRA

Merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit – LRA Tahun 2019 sebesar Rp117.236.769.405,61 dan pada tahun 2018 sebesar (Rp97.601.273.734,44).

b. Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto Tahun 2019 sebesar Rp121.757.265.684,91 mengalami penurunan 55,29% sebesar Rp272.358.289.419,35 dari Tahun 2018.

7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk tahun 2019 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan.

7.5.2.5 Saldo Anggaran lebih pada Tahun 2019 sebesar Rp238.994.035.090,52.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

7.5.3.1 Aset

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp28.917.379.713.966,00	Rp27.060.353.343.958,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, terdiri dari:

Tabel 33 Rincian Aset Per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Aset Lancar	769.201.156.578,19	708.477.735.910,65
2	Investasi Jangka Panjang	722.610.453.340,27	740.892.292.395,80
3	Aset Tetap	27.034.458.722.847,30	25.445.272.602.925,10
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	391.109.381.200,22	165.710.712.726,36
Jumlah		28.917.379.713.966,00	27.060.353.343.958,00

7.5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp769.201.156.578,19	Rp.708.477.735.910,65

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Lainnya dan Persediaan. Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp769.201.156.578,19 dan Rp708.477.735.910,65 sebagai berikut.

Tabel 34 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	222.096.474.878,19	163.894.359.620,58
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.091.229.858,00	4.333.124.383,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara JKN	1.507.133.476,00	1.018.371.115,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
5	Kas di BLUD	5.018.356.629,42	4.453.663.884,00
6	Kas Dana BOS	0,00	0,00
7	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	9.455.691.691,18	1.487.139.856,98
8	Piutang Pajak	478.670.075.953,27	423.765.655.006,50
9	Piutang Retribusi	29.982.675.692,00	22.749.598.980,00
10	Piutang Deviden	55.164.423.151,15	44.532.083.159,67
11	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	85.497.737.088,89	112.209.388.826,00
12	Belanja Dibayar Dimuka	38.668.258,33	146.783.359,16
13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	1.367.311.840,01	1.536.522.736,01
14	Piutang Lainnya	60.827.753.653,41	55.943.814.382,32
15	Piutang BLUD	11.446.044.628,00	21.166.004.130,00
16	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(239.784.553.004,47)	(209.883.836.907,57)
17	Persediaan	46.822.132.784,81	61.125.063.379,00
Jumlah		769.201.156.578,19	708.477.735.910,65

7.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp222.096.474.878,19	Rp163.894.359.620,58

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp222.096.474.878,19 dan Rp163.894.359.620,58 sebagai berikut.

Saldo Kas/Setara Kas per 31 Desember 2019 terdiri dari:

- Saldo awal 1 Januari 2018 (<i>Audited</i>)	Rp	163.894.359.620,58
- Kenaikan Kas Bersih Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019	Rp	58.202.115.257,61
Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	<u>222.096.474.878,19</u>

Rincian saldo pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai berikut.

Tabel 35 Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Nama Bank	Nama Bank Nomor Rekening	Saldo Rekening	
			31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar	Bank Sulselbar 130-001-000003414 3	222.096.474.878,19	163.894.359.620,58
Jumlah			222.096.474.878,19	163.894.359.620,58



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.3.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp1.091.229.858,00	Rp4.333.124.383,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp1.091.229.858,00 dan Rp4.333.124.383,00. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

7.5.3.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		0,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.1.4	Kas di Bendahara JKN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp1.507.133.476,00	Rp1.018.371.115,00

Sisa kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2019 pada Puskesmas selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp1.507.133.476,00 yang merupakan sisa kas di rekening masing-masing puskesmas sebesar Rp1.507.133.476,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 36 Kas di Bendahara JKN Puskesmas Per 31 Desember 2019

NO	NAMA PUSKESMAS	NO REKENING	RINCIAN SALDO AKHIR 31/12/2019	
			SALDO BANK	SALDO TUNAI
1	ANDALAS	130-002-000030127-1	0,00	0,00
2	ANTANG	130-002-000030128-9	31.435.825,00	0,00
3	ANTANG PERUMNAS	130-002-000030129-7	28.904.262,00	0,00
4	ANTARA	130-002-000030130-1	986,00	0,00
5	BAROMBONG	130-002-000030132-7	463.595.404,00	0,00
6	BATUA	130-002-000030133-5	53.985.219,00	0,00
7	BIRA	130-002-000030134-3	55.363.920,00	0,00
8	DAHLIA	130-002-000030136-0	20.797.360,00	0,00
9	KARUWISI	130-002-000030140-8	78.296.274,00	0,00
10	LAYANG	130-002-000030142-4	104.784.670,00	0,00
11	MACCINI SAWAH	130-002-000030143-2	264.060.340,00	0,00
12	MALIMONGAN BARU	130-002-000030145-9	727,00	0,00
13	MANGASA	130-002-000030147-5	66.877.714,00	0,00
14	MARADEKAYA	130-002-000030148-3	0,00	0,00
15	PANAMBUNGAN	130-002-000030151-3	183,00	0,00
16	TABARINGAN	130-002-000030157-2	55.220.040,00	0,00
17	TAMALANREA	130-002-000030159-9	33.187.010,00	0,00
18	TAMANGAPA	130-002-000030161-1	34.747.755,00	0,00
19	TARAKAN	130-002-000030162-9	332.983,00	0,00
20	BARRANG LOMPO	130-002-000030163-7	67.149.810,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

NO	NAMA PUSKESMAS	NO REKENING	RINCIAN SALDO AKHIR 31/12/2019	
			SALDO BANK	SALDO TUNAI
21	KAPASA	130-002-000030164-5	994.470,00	0,00
22	KODINGARENG	130-002-000030165-3	285.100,00	0,00
23	BULUROKENG	130-002-000030168-8	60.905.114,00	0,00
24	BANGKALA	130-002-000030166-1	57.195.550,00	0,00
25	BALLAPARANG	130-002-000030484-9	29.011.980,00	0,00
26	TODDOPULI	130-002-000030485-7	780,00	0,00
27	TAMALANREA JAYA	130-002-000030486-5	0,00	0,00
JUMLAH			1.507.133.476,00	0,00

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pada Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa saldo kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN tidak harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah dan dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Sisa kas tersebut tidak disetor ke rekening kas daerah karena rekening masing-masing puskesmas merupakan bagian dari kas daerah, yang penggunaannya langsung dengan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang secara rinci dapat dilihat pada *Lampiran 2*.

7.5.3.1.1.5 Kas di BLUD

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp5.018.356.629,42	Rp4.453.663.884,00

Sisa Kas per 31 Desember 2019 pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas terdapat sisa kas sebesar Rp5.018.356.629,42 yang merupakan sisa kas di rekening BLUD sesuai dengan laporan keuangan BLUD. Rincian sisa kas di BLUD sebagai berikut.

Tabel 37 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Satuan Kerja	Nama Bank Nomor Rekening	Saldo Rekening	
			31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Kas Di Bendahara Penerimaan	Bank Rakyat Indonesia 0403-01-000273-30-2	2.341.680.137,42	10.365.373,00
2	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Daya	Bank Sulselbar 130-002-000020623-5	56.191,00	816.180.172,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Bara Baraya	Bank Sulselbar 130-002-000030131-9	301.033.335,00	317.918.050,00
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Cendrawasih	Bank Sulselbar 130-002-000030135-1	1.895.585,00	174.095.200,00
5	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Jongaya	Bank Sulselbar 130-002-000030137-8	236.435.180,00	357.803.397,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Satuan Kerja	Nama Bank Nomor Rekening	Saldo Rekening	
			31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
6	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Jumpandang Baru	Bank Sulselbar 130-002-000030138-6	0,00	170.013.400,00
7	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Kaluku Bodoa	Bank Sulselbar 130-002-000030139-4	3.266.950,00	156.702.210,00
8	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Kassi Kassi	Bank Sulselbar 130-002-000030141-6	475.349.399,00	372.489.249,00
9	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Makkasau	Bank Sulselbar 130-002-000030144-1	44.727.654,00	110.590.654,00
10	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Mamajang	Bank Sulselbar 130-002-000030146-7	33.484.485,00	146.263.425,00
11	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Minasa Upa	Bank Sulselbar 130-002-000030149-1	66.047.005,00	192.680.370,00
12	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pampang	Bank Sulselbar 130-002-000030150-5	47.095.685,00	117.590.750,00
13	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pattingalloang	Bank Sulselbar 130-002-000030152-1	8.898.204,00	15.759.124,00
14	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pertiwi	Bank Sulselbar 130-002-000030153-0	15.855.324,00	143.845.604,00
15	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Rappokalling	Bank Sulselbar 130-002-000030154-8	5.703.370,00	88.653.150,00
16	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Sudiang	Bank Sulselbar 130-002-000030155-6	121.910.722,00	224.453.760,00
17	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Sudiang Raya	Bank Sulselbar 130-002-000030156-4	158.582.110,00	173.016.800,00
18	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tamalate	Bank Sulselbar 130-002-000030158-1	265.337.074,00	238.095.025,00
19	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tamamaung	Bank Sulselbar 130-002-000030160-2	364.078.018,00	227.735.676,00
20	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Paccerakkang	Bank Sulselbar 130-002-000030167-0	354.702.569,00	182.990.610,00
21	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Maccini Sombala	Bank Sulselbar 130-002-000030126-2	172.217.632,00	216.421.885,00
Jumlah			5.018.356.629,42	4.453.663.884,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Adapun rincian kas di BLUD dapat dilihat pada *Lampiran 3*.

7.5.3.1.1.6 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp9.455.691.691,18	Rp1.487.139.856,98

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.455.691.691,18 merupakan kas dana BOS, di mana sebesar Rp8.649.163.558,00 merupakan sisa kas di bank dan sebesar Rp820.611.523,82 merupakan sisa kas tunai di Bendahara BOS (dapat dilihat pada *Lampiran 4*).

7.5.3.1.1.7 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Makassar dan/atau hak Pemerintah Kota Makassar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan Pemerintah Kota Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah Kota Makassar dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

7.5.3.1.1.7 Piutang Pajak	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp478.670.075.953,27	Rp423.765.655.006,50

Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp478.670.075.953,27 dan sebesar Rp423.765.655.006,50. Saldo piutang ini dicatat berdasarkan nilai nominal sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan, yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan belum dilunasi oleh wajib pajak. Rincian penyesuaian saldo awal dan mutasi penambahan dan pengurangan pajak selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39 Rincian Mutasi dan Penyesuaian Saldo Awal Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019

No	JENIS PAJAK	SALDO AKHIR 31/12/2018	MUTASI		SALDO AKHIR PER 31/12/2019
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6 = (3+4-5)
1	Pajak Hotel	4.355.113.758,17	1.543.663.752,00	1.641.931.954,40	4.256.845.556,14
2	Pajak Hiburan	9.680.602.389,44	0,00	84.549.706,00	9.596.052.683,44
3	Pajak ABT	634.681.803,00	771.190.740,00	362.597.558,00	1.043.274.985,00
4	Pajak Restoran	2.272.550.773,36	2.118.551.049,09	473.832.836,00	3.917.268.986,45
5	Pajak Parkir	1.684.396.142,20	0,00	281.194.204,00	1.403.201.938,20
6	PPJ Non Jalan	6.696.222,00	0,00	0,00	6.696.222,00
7	PPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Reklame	7.186.824.528,09	139.109.875,00	2.006.698.361,00	5.319.236.043,00
9	PBB	397.944.789.390,24	70.552.817.150	15.370.107.002,00	453.127.499.538,24
	JUMLAH	423.765.655.006,50	75.125.332.567,00	20.220.911.621,40	478.670.075.953,27



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Saldo Awal Piutang Pajak Daerah pada 1 Januari 2019 sebesar Rp423.765.655.006,50. Saldo tersebut di Tahun 2019 mengalami mutasi penambahan akibat belum terealisasi atau belum terbayarkan senilai Rp75.125.332.567,00 dan terdapat pula pengurangan sebesar Rp20.220.911.621,40 yang disebabkan karena pengurangan akibat pelunasan piutang pajak tahun sebelumnya yang tercatat dalam neraca tahun anggaran 2018, sehingga saldo akhir piutang pajak per 31 Desember 2019 berjumlah sebesar Rp478.670.075.953,27.

Penyisihan Piutang Pajak	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(219.791.401.497,23)	(Rp191.203.736.109,23)

Atas Piutang Pajak Daerah tersebut di atas dilakukan analisis umur piutang. Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp219.791.401.497,23 sehingga piutang pajak daerah disajikan dengan nilai netto sebesar Rp 258.878.674.456,04 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 40 Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 dan 2019
dalam Rupiah

No	JENIS PAJAK	SALDO AKHIR 31/12/2018	SALDO AKHIR 31/12/2019
	DINAS PENDAPATAN		
1	Pajak Hotel Bruto	4.355.113.758,17	4.256.845.556,14
	Penyisihan	763.385.274,62	606.910.397,97
	Jumlah Netto	3.591.728.483,55	3.649.935.158,17
2	Pajak Hiburan Bruto	9.680.602.389,44	9.596.052.683,44
	Penyisihan	1.960.389.477,64	1.951.934.507,04
	Jumlah Netto	7.720.212.911,80	7.644.118.176,40
3	Pajak Air Tanah Bruto	634.681.803,00	1.043.274.985,00
	Penyisihan	30.265.816,82	57.890.490,50
	Jumlah Netto	604.415.986,18	985.384.494,50
4	Pajak Restoran Bruto	2.272.550.773,36	3.917.268.986,45
	Penyisihan	1.390.152.987,44	1.353.362.459,08
	Jumlah Netto	882.397.785,92	2.563.906.527,37
5	Pajak Parkir Bruto	1.684.396.142,20	1.403.201.938,00
	Penyisihan	203.230.059,22	175.110.638,80
	Jumlah Netto	1.481.166.082,98	1.228.091.299,40
6	PPJ non jalan Bruto	6.696.222,00	6.696.222,00
	Penyisihan	4.055.051,00	5.312.612,50
	Jumlah Netto	2.641.171,00	1.383.609,50
7	Pajak Reklame Bruto	7.186.824.528,09	5.319.236.042,00
	Penyisihan	2.340.991.674,30	2.937.080.536,10
	Jumlah Netto	4.845.832.854,71	2.382.155.506,90
8	PBB Bruto	397.944.789.390,24	453.127.499.538,24
	Penyisihan	184.511.265.768,20	212.703.799.855,67
	Jumlah Netto	213.433.523.621,04	240.423.699.682,57
	Total Pajak Bruto	423.765.655.006,50	478.670.075.953,27
	Total Penyisihan	191.203.736.109,23	219.791.401.497,23
	Total Pajak Netto	232.561.918.897,27	258.878.674.456,04

Adapun Rincian Piutang Pajak dan Penyisihannya selama 2018 dan 2019 berdasarkan umur piutangnya dapat dilihat pada *Lampiran 5*.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Penjelasan masing-masing atas Saldo Akhir Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 diuraikan sebagai berikut.

a. Pajak Hotel

Saldo awal piutang Pajak Hotel yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2019 sebesar Rp4.355.113.758,17,00 terdapat penambahan piutang dari hasil LHP-BPK RI sebesar Rp2.574.633.220,00 dan terdapat pelunasan piutang PDTT sebesar Rp2.672.901.422,00 sehingga nilai piutang akhir pajak hotel sebesar Rp4.256.845.556,14.

Adapun gambaran piutang pajak hotel per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41 Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember 2019

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2018			Saldo
			Penambahan Piutang LHP-Ri, Piutang PDTT	Pengurangan		
				Pelunasan	Penghapusan	
1	2007	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2	2008	21.817.000,00	0,00	0,00	0,00	21.817.000,00
3	2009	42.469.395,00	0,00	0,00	0,00	42.469.395,00
4	2010	56.045.054,00	0,00	0,00	0,00	56.045.054,00
5	2011	61.834.583,00	0,00	0,00	0,00	61.834.583,00
6	2012	180.938.300,00	0,00	0,00	0,00	180.938.300,00
7	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2017	3.990.809.426,17	0,00	2.672.901.422,00	0,00	1.317.908.004,17
10	2019	0,00	2.574.633.220,00	0,00	0,00	2.574.633.220,00
Jumlah		4.355.113.758,17	2.574.633.220,00	2.672.901.422,00	0,00	4.256.845.556,17

b. Pajak Restoran

Saldo awal piutang Pajak Restoran yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2019 sebesar Rp2.272.550.773,36. Terdapat penambahan piutang sebesar Rp2.118.551.049,09 sampai 31 Desember 2019 dan pengurangan piutang pajak restoran yang secara kumulatif berjumlah sebesar Rp473.832.836,00. Pengurangan ini bersumber dari pelunasan piutang pajak restoran untuk masa pajak tahun 2010, sehingga saldo akhir piutang pajak restoran per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.917.268.986,45. Dengan penyisihan piutang sebesar Rp1.353.362.459,08, maka piutang pajak restoran disajikan netto sebesar Rp2.563.906.527,37.

Adapun rincian piutang pajak restoran per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42 Piutang Pajak Restoran Per 31 Desember 2019

dalam Rupiah

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2019				Saldo Akhir
			Penambahan Piutang LHP BPK	Pengurangan			
				Pelunasan	Penghapusan	Reklasifikasi	
1	2007	26.486.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.486.277,00
2	2008	124.831.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.831.322,00
3	2009	65.430.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.430.767,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2019				Saldo Akhir
			Penambahan Piutang LHP BPK	Pengurangan			
				Pelunasan	Penghapusan	Reklasifikasi	
4	2010	489.659.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.659.448,00
5	2011	275.994.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.994.600,00
6	2012	300.706.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.706.375,00
7	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2018	0,00	980.441.984,36	473.832.836,00	0,00	0,00	506.609.148,36
11	2019	0,00	2.336.165.556,09	0,00	0,00	0,00	2.553.780.063,09
Jumlah		1.292.108.789,00	3.316.607.540,45	691.447.343,00	0,00	0,00	3.917.268.986,45

c. Pajak Hiburan

Saldo awal piutang Pajak Hiburan yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp9.680.602.389,44, tidak terdapat penambahan piutang sedangkan pengurangan piutang pajak secara kumulatif senilai Rp84.549.706,-. Sehingga saldo akhir nilai piutang pajak hiburan sampai 31 Desember 2019 senilai Rp 9.596.052.683,44.

Adapun Rincian piutang pajak hiburan per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43 Piutang Pajak Hiburan Per 31 Desember 2019

dalam Rupiah

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2019			Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan		
				Pelunasan	Penghapusan	
1	2008	39.117.552,00	0,00	0,00	0,00	39.117.552,00
2	2009	156.927.237,00	0,00	0,00	0,00	156.927.237,00
3	2010	270.417.118,00	0,00	0,00	0,00	270.417.118,00
4	2011	431.448.136,00	0,00	0,00	0,00	431.448.136,00
5	2012	204.678.000,00	0,00	0,00	0,00	204.678.000,00
6	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2017	8.578.014.346,44	0,00	84.549.706,00	0,00	8.493.464.640,44
10	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		9.680.602.389,44	0,00	84.549.706,00	0,00	9.596.052.683,44

d. Pajak Reklame

Saldo akhir piutang Pajak Reklame yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.319.236.042,00, dari saldo awal sebesar Rp7.186.824.528,90. Terdapat penambahan piutang pada tahun 2019 sebesar Rp139.109.875,00,- yang merupakan piutang murni di tahun 2019, selain penambahan piutang juga terdapat pengurangan piutang yang bersumber dari



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

pelunasan piutang pajak tahun sebelumnya dengan nilai sebesar Rp2.006.698.361,00.

Adapun Rincian piutang pajak per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44 Piutang Pajak Reklame Per 31 Desember 2019
dalam Rupiah

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2019			Saldo
			Penambahan		Pengurangan	
			Koreksi Saldo Awal	Tahun berjalan		
1	2010	563.637.000,00	0,00	0,00	0,00	563.637.000,00
2	2011	219.316.400,00	0,00	0,00	0,00	219.316.400,00
3	2012	247.655.550,00	0,00	0,00	0,00	247.655.550,00
4	2013	643.106.072,00	0,00	0,00	0,00	643.106.072,00
5	2014	509.669.475,00	0,00	0,00	0,00	509.669.475,00
6	2015	441.780.200,00	0,00	0,00	1.220.000,00	440.560.200,00
7	2016	694.494.480,00	0,00	0,00	0,00	694.494.480,00
8	2017	1.081.753.053,00	0,00	0,00	292.538.750,00	789.214.303,00
9	2018	2.785.412.299,00		0,00	1.712.939.611,00	1.072.472.688,00
9	2019	0,00	0,00	139.109.875,00	0,00	139.109.875,00
Jumlah		7.186.824.528,09	0,00	139.109.875,00	2.006.698.361,00	5.319.236.043,00

e. Pajak Parkir

Saldo awal piutang Pajak Parkir yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2019 sebesar Rp1.684.396.142,20. Tidak terdapat penambahan saldo sedangkan terdapat pengurangan sebesar Rp281.194.204,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.403.201.938,20. Dengan penyisihan sebesar Rp175.110.638,80 sehingga pajak parkir disajikan netto sebesar Rp1.228.091.299,20. Adapun Rincian piutang pajak parkir per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 45 Piutang Pajak Parkir Per 31 Desember 2019
dalam Rupiah

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2019			Saldo
			Penambahan	Pengurangan		
				Pelunasan	Penghapusan	
1	2007	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2	2008	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00
3	2009	3.462.500,00	0,00	0,00	0,00	3.462.500,00
4	2010	5.639.800,00	0,00	0,00	0,00	5.639.800,00
5	2011	13.240.250,00	0,00	0,00	0,00	13.240.250,00
6	2012	13.018.500,00	0,00	0,00	0,00	13.018.500,00
7	2018	1.645.740.092,20	0,00	281.194.204,00	0,00	1.364.545.888,20
Jumlah		1.684.396.142,20	0,00	281.194.204,00	0,00	1.403.201.938,20



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

f. Pajak Penerangan Non PLN

Saldo awal piutang Pajak Penerangan Non PLN yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2019 sebesar Rp6.696.222,00. Dari saldo awal tersebut tidak terdapat penambahan maupun pengurangan piutang pajak. Dengan penyisihan sebesar Rp5.312.612,50, maka Pajak Penerangan Non PLN disajikan netto sebesar Rp1.383.609,50.

Adapun Rincian piutang pajak per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46 Piutang PPJ Non PLN Per 31 Desember 2019

dalam Rupiah

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2019		Saldo Akhir
			Penambahan	Penghapusan	
1	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2013	1.413.880,00	0,00	0,00	1.413.880,00
3	2014	2.515.122,00	0,00	0,00	2.515.122,00
4	2015	2.767.220,00	0,00	0,00	2.767.220,00
Jumlah		6.696.222,00	0,00	0,00	6.696.222,00

g. Pajak Air Bawah Tanah

Saldo awal piutang Pajak Air Bawah Tanah yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2019 sebesar Rp634.681.803,00. Terdapat penambahan piutang Pajak Air Bawah Tanah khusus Tahun 2019 sebesar Rp771.190.740,00 dan pengurangan piutang sebesar Rp362.597.558,00 yang merupakan pelunasan atas piutang tahun 2014 sampai tahun 2019. Sehingga saldo akhir Piutang Pajak Air Bawah Tanah yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.043.274.985,00. Dengan penyisihan sebesar Rp57.890.490,50, maka pajak air bawah tanah disajikan netto sebesar Rp985.384.494,50.

Adapun Rincian piutang pajak Air Bawah Tanah per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 47 Piutang Pajak Air Bawah Tanah Per 31 Desember 2019

dalam Rupiah

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2019		Saldo Akhir
			Penambahan	Penghapusan	
1	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2013	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00
3	2014	5.252.300,00	0,00	0,00	5.252.300,00
4	2015	20.559.600,00	0,00	0,00	20.559.600,00
5	2016	43.542.640,00	0,00	0,00	43.542.640,00
6	2017	103.491.700,00	0,00	3.545.560,00	99.946.140,00
7	2018	461.486.563,00	0,00	359.051.998,00	102.434.565,00
8	2019	0,00	771.190.740,00	0,00	771.190.740,00
Jumlah		634.681.803,00	771.190.740,00	362.597.558,00	1.043.274.985,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

h. Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagai gambaran bahwa saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp453.127.499.538,00 dengan Saldo Awal per 01 Januari 2019 sebesar Rp397.944.789.390,24. Dari Saldo Awal tersebut terdapat Koreksi Saldo Awal, Mutasi Penambahan dan Mutasi Pengurangan yang terdiri dari :

(a) **Koreksi Saldo Awal**

Dari Saldo Awal sebesar Rp397.944.789.390,24 mengalami koreksi sebesar Rp714.122.610,00 yang terdiri dari :

1. Mutasi Nilai Ketetapan yang disebabkan Pembetulan Luas Bumi SPPT, Pembetulan Luas Bangunan SPPT dan atau Pemecahan SPPT Pajak sebesar (Rp33.085.443,00).
2. Penambahan Piutang PBB Masa Pajak 1994 sampai dengan 2018 yang bukan merupakan bagian dari saldo awal dan disebabkan Penerbitan SPPT Baru, Pemecahan SPPT dan atau *Cleansing Data* sebesar Rp747.208.053,00.
3. Dari Koreksi Saldo Awal yang sebagaimana dijelaskan di atas, maka jumlah Saldo Awal Piutang sebesar Rp398.658.912.000,00. Sebagai gambaran Koreksi Saldo Awal yang dimaksud diuraikan pada tabel di bawah ini :

Koreksi Saldo Awal Piutang TA 2019

BULAN	SALDO AWAL PER 01 JANUARI 2019	KOREKSI SALDO AWAL			SALDO PIUTANG SETELAH KOREKSI
		MUTASI NILAI KETETAPAN/ PIUTANG 2019	PIUTANG YANG TIDAK TERCATA DALAM NERACA	JUMLAH KOREKSI	
1	2	3	4	5	6
BIRINGKANAYA	50.477.642.277	(861.314)	236.039.453	235.178.139	50.712.820.416
BONTOALA	5.290.625.095	(260.094)	4.250.675	3.990.581	5.294.615.676
MAKASSAR	5.616.602.385	(87.237)	21.109.814	21.022.577	5.637.624.962
MAMAJANG	8.851.952.412	(161.732)	8.635.771	8.474.039	8.860.426.451
MANGGALA	25.996.014.106	(18.942.784)	82.963.286	64.020.502	26.060.034.608
MARISO	8.685.075.603	(2.156.061)	1.606.857	(549.204)	8.684.526.399
PANAKKUKANG	51.806.612.380	(2.611.823)	19.144.020	16.532.197	51.823.144.577
RAPPOCINI	28.413.126.334	(3.844.157)	115.081.932	111.237.775	28.524.364.109
TALLO	10.540.219.267	(3.417.817)	7.466.599	4.048.782	10.544.268.049
TAMALANREA	58.095.045.053	(3.852.087)	128.352.847	124.500.760	58.219.545.813
TAMALATE	43.074.153.213	4.833.378	94.813.966	99.647.344	43.173.800.557
UJUNG PANDANG	15.410.646.508	-	18.530.872	18.530.872	15.429.177.380
UJUNG TANAH	1.536.829.180	-	84.082	84.082	1.536.913.262
WAJO	13.741.141.222	(1.723.715)	8.609.623	6.885.908	13.748.027.130
SANGKARRANG	3.236.730	-	518.256	518.256	3.754.986
KAWASAN PELABUHAN	9.099.676.011	-	-	-	9.099.676.011
PDTT	61.306.191.614	-	-	-	61.306.191.614
JUMLAH PER KECAMATAN	397.944.789.390	(33.085.443)	747.208.053	714.122.610	398.658.912.000



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(b) **Mutasi Penambahan**

Dari Saldo Piutang PBB setelah dikoreksi sebesar Rp398.658.912.000,00, mengalami mutasi penambahan sebesar Rp213.737.187.549,00 yang terdiri dari :

- Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Masa Pajak 2019 di awal Tahun 2019 pada 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan serta Obyek Pajak Kawasan Pelabuhan sebesar Rp212.229.797.772,00 dengan jumlah SPPT sebanyak 348.216 lembar.
- Mutasi Ketetapan yang disebabkan Pengurangan Nilai SPPT, Pemecahan, Pembetulan Luas Bumi atau Bangunan SPPT serta Peningkatan Potensi Obyek Pajak Baru dikarenakan Penerbitan SPPT baru sebesar Rp1.507.389.777,00 dengan jumlah SPPT sebanyak 4.118 Lembar.

Dari Mutasi Penambahan sebagaimana yang jelaskan diatas, maka jumlah Piutang PBB untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp612.396.099.549,00

Sebagai gambaran mutasi penambahan dimaksud diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel :
Mutasi Panambahan Piutang TA 2019

BULAN	SALDO PIUTANG SETELAH KOREKSI	MUTASI PENAMBAHAN			SALDO PIUTANG SETELAH PENAMBAHAN
		LO/ KETETAPAN 2019 (Cetak Massal)	MUTASI LO/ KETETAPAN 2019	JUMLAH MUTASI PENAMBAHAN	
1	6	7	8	9	10
BIRINGKANAYA	50.712.820.416	22.571.922.396	(29.846.744)	22.542.075.652	73.254.896.068
BONTOALA	5.294.615.676	4.222.461.993	(3.017.468)	4.219.444.525	9.514.060.201
MAKASSAR	5.637.624.962	7.285.557.783	(44.117.117)	7.241.440.666	12.879.065.628
MAMAJANG	8.860.426.451	5.450.236.622	(13.982.804)	5.436.253.818	14.296.680.269
MANGGALA	26.060.034.608	8.696.915.081	56.181.529	8.753.096.610	34.813.131.218
MARISO	8.684.526.399	7.083.072.665	109.417.628	7.192.490.293	15.877.016.692
PANAKKUKANG	51.823.144.577	34.801.722.931	3.977.573	34.805.700.504	86.628.845.081
RAPPOCINI	28.524.364.109	20.746.643.067	(169.747.886)	20.576.895.181	49.101.259.290
TALLO	10.544.268.049	7.638.924.078	1.982.958.263	9.621.882.341	20.166.150.390
TAMALANREA	58.219.545.813	27.727.741.767	515.737.161	28.243.478.928	86.463.024.741
TAMALATE	43.173.800.557	34.649.833.599	(685.096.533)	33.964.737.066	77.138.537.623
UJUNG PANDANG	15.429.177.380	15.773.642.871	(47.652.984)	15.725.989.887	31.155.167.267
UJUNG TANAH	1.536.913.262	1.110.566.304	(3.020.318)	1.107.545.986	2.644.459.248
WAJO	13.748.027.130	10.169.586.586	(164.400.523)	10.005.186.063	23.753.213.193
SANGKARRANG	3.754.986	47.328.916	-	47.328.916	51.083.902
KAWASAN PELABUHAN	9.099.676.011	4.253.641.113	-	4.253.641.113	13.353.317.124
PDTT	61.306.191.614				61.306.191.614
JUMLAH PER KECAMATAN	398.658.912.000	212.229.797.772	1.507.389.777	213.737.187.549	612.396.099.549

(c) **Mutasi Pengurangan**



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Dari Jumlah Piutang PBB TA 2019 sebesar Rp612.396.099.549,00 dan sepanjang perjalanan APBD TA 2019 terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp159.268.600.011,00 yang secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel :
Mutasi pengurangan Piutang TA. 2019

BULAN	SALDO PIUTANG SETELAH PENAMBAHAN	PENGURANGAN					PIUTANG AKHIR 2019
		PEMBAYARAN PIUTANG YANG TERCATAT	PEMBAYARAN PIUTANG YANG TIDAK TERCATAT	PEMBAYARAN LO/KETETAPAN 2019	PELUNASAN PIUTANG	JUMLAH PENGURANGAN (POKOK KETETAPAN)	
1	10	11	12	13	14	15	16
BIRINGKANAYA	73.254.896.068	2.233.692.761	236.039.453	13.447.386.159	974.146	15.918.092.519	57.336.803.549
BONTOALA	9.514.060.201	141.270.975	4.250.675	3.768.026.724	98.184	3.913.646.558	5.600.413.643
MAKASSAR	12.879.065.628	292.462.820	21.109.814	6.118.976.819	1.057.633	6.433.607.086	6.445.458.542
MAMAJANG	14.296.680.269	369.439.339	8.635.771	4.263.817.614	1.564.992	4.643.457.716	9.653.222.553
MANGGALA	34.813.131.218	1.128.533.579	82.963.286	3.557.441.801	216.454.173	4.985.392.839	29.827.738.379
MARISO	15.877.016.692	256.974.654	1.606.857	5.466.425.649	918.227	5.725.925.387	10.151.091.305
PANAKKUKANG	86.628.845.081	2.010.293.363	19.144.020	22.915.211.958	108.764.153	25.053.413.494	61.575.431.587
RAPPOCINI	49.101.259.290	1.890.618.434	115.081.932	13.121.025.959	2.174.302	15.128.900.627	33.972.358.663
TALLO	20.166.150.390	457.806.950	7.466.599	7.985.868.991	364.482	8.451.507.022	11.714.643.368
TAMALANREA	86.463.024.741	2.384.452.821	128.352.847	16.522.991.521	1.805.629	19.037.602.818	67.425.421.923
TAMALATE	77.138.537.623	2.523.681.438	94.813.966	18.774.598.500	2.205.372	21.395.299.276	55.743.238.347
UJUNG PANDANG	31.155.167.267	809.078.273	18.530.872	13.456.174.311	14.311.872	14.298.095.328	16.857.071.939
UJUNG TANAH	2.644.459.248	46.654.846	84.082	1.012.453.177	892.905	1.060.085.010	1.584.374.238
WAJO	23.753.213.193	440.354.436	8.609.623	8.516.558.604	-	8.965.522.663	14.787.690.530
SANGKARRANG	51.083.902	120.800	518.256	45.348.330	-	45.987.386	5.096.516
KAWASAN PELABUHAN	13.353.317.124	-	-	4.212.064.282	-	4.212.064.282	9.141.252.842
PDTT	61.306.191.614						61.306.191.614
JUMLAH PER KECAMATAN	612.396.099.549	14.985.435.489	747.208.053	143.184.370.399	351.586.070	159.268.600.011	453.127.499.538

Adapun rincian dari pengurangan piutang yang dimaksud di atas yakni :

1. Pembayaran Piutang untuk Masa Pajak 1994 s.d. 2016 yang merupakan bagian dari Saldo Piutang Awal yang tercatat dalam Neraca Daerah sebesar Rp14.985.435.489,00.
2. Pembayaran Piutang untuk Masa Pajak 1994 sd 2016 yang bukan merupakan bagian dari Saldo Piutang Awal sebesar Rp747.208.053,00.
3. Pembayaran Ketetapan Masa Pajak 2019 yang dicetak pada 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan serta Obyek Pajak Kawasan Pelabuhan sebesar Rp143.184.370.399,00.
4. Pelunasan Piutang bagian dari Saldo Awal masa pajak 1994 s.d. 2018 yang sudah melakukan pembayaran tetapi tercatat sebagai saldo piutang dan dikoreksi akibat wajib pajak menunjukkan bukti pembayaran (STTS) dan atau Slip Pembayaran PBB sebesar Rp351.586.070,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.3.1.1.8 Piutang Retribusi

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp29.982.675.692,00	Rp22.749.598.980,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp29.982.675.692,00 dicatat berdasarkan nilai nominal sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan dan belum dilunasi oleh wajib retribusi. Rincian mutasi dan penyesuaian saldo awal piutang retribusi Tahun 2019 dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 48 Rincian Mutasi dan Penyesuaian Saldo Awal Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

NO	SKPD/Jenis Retribusi	SALDO AKHIR 31/12/2018	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL PER 01/01/2019	MUTASI DI TAHUN 2019		SALDO AKHIR 31/12/2019
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3			4	5	6 = (3+4)-5
I	PIUTANG RETRIBUSI UMUM						
A.	Badan Pendapatan Daerah						
-	Retribusi Pelataran	2.496.653.520,00	0,00	2.496.653.520,00	16.670.119,00	281.447.907,00	2.231.875.732,00
	Retribusi Titik Reklame	6.138.183.200,00	0,00	6.138.183.200,00		3.500.000,00	6.134.683.200,00
B.	DPMPSTP						
-	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	5.289.957.000,00	0,00	5.289.957.000,00	3.785.441.000,00	929.224.000,00	8.146.174.000,00
-	Retribusi Kompensasi Lahan Pekuburan	2.117.023.000,00	0,00	2.117.023.000,00	1.335.313.000,00	554.452.000,00	2.897.884.000,00
C	Dinas Lingkungan Hidup Daerah						
-	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	373.672.000,00	0,00	373.672.000,00	0,00	0,00	373.672.000,00
D.	Dinas Komunikasi dan Informatika						
-	Retribusi Menara Telekomunikasi	183.355.000,00	0,00	183.355.000,00	0,00	0,00	183.355.000,00
E.	Dinas Pemadam Kebakaran						
-	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam	11.670.000,00	0,00	11.670.000,00	12.640.000,00	11.670.000,00	12.640.000,00
F.	Dinas Perumahan dan Gedung						
-	Retribusi Sewa Kamar Penghuni Rusunawa	566.580.000,00	0,00	566.580.000,00	190.080.000,00	0,00	756.660.000,00
G.	PIUTANG RETRIBUSI SAMPAH KECAMATAN						
-	Kecamatan Bontoala	290.355.500,00	0,00	290.355.500,00	270.728.000,00	216.964.000,00	344.119.500,00
-	Kecamatan Biringkanaya	0,00	0,00	0,00	42.603.000,00	-	42.603.000,00
-	Kecamatan Makassar	812.841.000,00	0,00	812.841.000,00	3.929.000,00	-	816.770.000,00
-	Kecamatan Mamajang	505.440.000,00	0,00	505.440.000,00	949.698.000,00	-	1.455.138.000,00
-	Kecamatan Mariso	612.393.760,00	0,00	612.393.760,00	260.498.000,00	66.126.000,00	806.765.760,00
-	Kecamatan Panakukang	593.732.000,00	0,00	593.732.000,00	1.023.867.000,00	121.740.000,00	1.495.859.000,00
-	Kecamatan Wajo	1.103.401.000,00	0,00	1.103.401.000,00	334.106.000,00	216.959.000,00	1.220.548.000,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

NO	SKPD/Jenis Retribusi	SALDO AKHIR 31/12/2018	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL PER 01/01/2019	MUTASI DI TAHUN 2019		SALDO AKHIR 31/12/2019
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3			4	5	6 = (3+4)-5
-	Kecamatan Manggala	29.448.000,00	0,00	29.448.000,00	0,00	0,00	29.448.000,00
-	Kecamatan Tamalanrea	65.329.000,00	0,00	65.329.000,00	0,00	0,00	65.329.000,00
-	Kecamatan Rappocini	878.924.000,00	0,00	878.924.000,00	884.776.000,00	356.136.000,00	1.407.564.000,00
-	Kecamatan Tallo	162.382.000,00	0,00	162.382.000,00	235.154.000,00	28.124.000,00	369.412.000,00
-	Kecamatan Tamalate	131.389.000,00	0,00	131.389.000,00	297.916.000,00	43.500.000,00	385.805.000,00
-	Kecamatan Ujung Tanah	285.408.000,00	0,00	285.408.000,00	146.071.000,00	49.946.000,00	381.533.000,00
-	Kecamatan Ujung Pandang	101.462.000,00	0,00	101.462.000,00	388.491.500,00	65.116.000,00	424.837.500,00
JUMLAH		22.749.598.980,00	0,00	22.749.598.980,00	10.177.981.619,00	2.944.904.907,00	29.982.675.692,00

**Penyisihan Piutang
Retribusi**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(10.821.801.073,59)	(Rp9.344.412.246,58)

Atas Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp29.982.675.692,00, tersebut dilakukan analisis umur piutang. Nilai penyisihan piutang retribusi tidak tertagih per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.821.801.073,59 sehingga piutang retribusi daerah disajikan dengan nilai netto sebesar Rp19.160.874.618,90 yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 49 Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 dan 2018

dalam rupiah

No	JENIS RETRIBUSI	SALDO AKHIR 31/12/2019	SALDO AKHIR 31/12/2018
1	BADAN PENDAPATAN		
-	Pelataran Bruto	2.231.875.732,00	2.496.653.520,00
	Penyisihan	1.547.718.195,60	1.228.090.527,59
	Jumlah Netto	684.157.536,41	1.268.562.992,42
-	Titik Reklame Bruto	6.134.683.200,00	6.138.183.200,00
	Penyisihan	5.818.533.200,00	5.451.294.200,00
	Jumlah Netto	316.150.000,00	686.889.000,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		
-	Pelayanan Persampahan/Kebersihan Bruto	373.672.000,00	373.672.000,00
	Penyisihan	373.672.000,00	373.672.000,00
	Jumlah Netto	0,00	0,00
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
-	IMB dan Pelataran Bruto	8.146.174.000,00	5.289.957.000,00
	Penyisihan	2.124.202.805,00	1.929.043.540,00
	Jumlah Netto	6.021.971.195,00	3.360.913.460,00
-	Retribusi Kompensasi Lahan Pekuburan	2.897.884.000,00	2.117.023.000,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	JENIS RETRIBUSI	SALDO AKHIR 31/12/2019	SALDO AKHIR 31/12/2018
	Penyisihan	162.933.665,00	10.585.115,00
	Jumlah Netto	2.734.950.335,00	2.106.437.885,00
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
-	Menara Telekomunikasi Bruto	183.355.000,00	183.355.000,00
	Penyisihan	183.355.000,00	91.677.500,00
	Jumlah Netto	0,00	91.677.500,00
5	DINAS DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG		
-	Sewa Kamar Penghuni Rusunawa Bruto	756.660.000,00	566.580.000,00
	Penyisihan	57.608.400,00	20.570.825,00
	Jumlah Netto	699.051.600,00	546.009.175,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		
-	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam	12.640.000,00	11.670.000,00
	Penyisihan	63.200,00	58.350,00
	Jumlah Netto	12.576.800,00	11.611.650,00
B	PIUTANG RETRIBUSI SAMPAH		
1	Kecamatan Bontoala	344.119.500,00	290.355.500,00
2	Kecamatan Biringkanaya	42.603.000,00	-
3	Kecamatan Makassar	816.770.000,00	812.841.000,00
4	Kecamatan Mamajang	1.455.138.000,00	505.440.000,00
5	Kecamatan Mariso	806.765.760,00	612.393.760,00
6	Kecamatan Panakukang	1.495.859.000,00	593.732.000,00
7	Kecamatan Wajo	1.220.548.000,00	1.103.401.000,00
8	Kecamatan Manggala	29.448.000,00	29.448.000,00
9	Kecamatan Tamalanrea	65.329.000,00	65.329.000,00
10	Kecamatan Rappocini	1.407.564.000,00	878.924.000,00
11	Kecamatan Tallo	369.412.000,00	162.382.000,00
12	Kecamatan Tamalate	385.805.000,00	131.389.000,00
13	Kecamatan Ujung Tanah	381.533.000,00	285.408.000,00
14	Kecamatan Ujung Pandang	424.837.500,00	101.462.000,00
	Jumlah Piutang Retribusi Sampah Bruto	9.245.731.760,00	5.572.505.260,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Sampah	553.714.607,50	239.420.188,50
	Jumlah Piutang Retribusi Sampah Netto	8.692.017.152,50	5.333.085.071,50
	Total Retribusi Bruto	29.982.675.692,00	22.749.598.980,00
	Penyisihan Piutang	10.821.801.073,10	9.344.412.246,58
	Total Retribusi Netto	19.160.874.618,90	13.405.186.733,42

Adapun rincian piutang retribusi dan perhitungan penyisihannya dapat dilihat pada *Lampiran 6*.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.3.1.1.9	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp55.164.423.151,15	Rp44.532.083.159,67

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 sebesar Rp55.164.423.151,15 merupakan kekurangan Bagian Laba Tahun Buku 2017 yang harus disetor ke Kas Daerah dari PD Pasar Makassar Raya, PD Rumah Pemotongan Hewan, PD Parkir Makassar Raya, dan PDAM Kota Makassar. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut dan dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

Tabel 50 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Jenis Retribusi	Saldo Awal 01/01/2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 31/12/2019 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1.	PD. Pasar Makassar Raya	802.874.547,32	748.484.510,40	802.874.497,00	748.484.560,70
2.	PD. Rumah Pemotongan Hewan	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
3.	PD. Parkir Makassar Raya	1.236.669.413,67	447.900.145,28	762.993.082,00	921.576.476,95
5.	PDAM Kota Makassar	42.462.539.198,70	20.922.052.691,80	9.920.229.777,00	53.464.362.113,50
Jumlah		44.532.083.159,69	22.118.437.347,48	11.486.097.356,00	55.164.423.151,15

7.5.3.1.1.10	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp85.497.737.088,89	Rp112.209.388.826,00

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp85.497.737.088,89 dan sebesar Rp112.209.388.826,00. Piutang tersebut merupakan kurang bayar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum ditransfer s.d. 31 Desember 2019 terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, PBBKB, Pajak Bahan Bakar, dan Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok sebesar Rp85.497.737.088,89.

Adapun Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dapat dilihat pada *Lampiran 8*.

7.5.3.1.1.11	Belanja Dibayar Dimuka	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp38.668.258,33	Rp146.783.359,16

Belanja Dibayar Dimuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp38.668.258,33. Belanja Dibayar di muka timbul karena terdapat pembayaran sewa/kontrak yang telah terbayarkan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 masa kontrak belum habis. Adapun rincian Belanja Dibayar Di muka dapat dilihat pada Tabel di bawah.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 51 Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2019
dalam Rupiah

NO	Jenis Sewa Dibayar Dimuka	Saldo Awal 01/01/2019	Penyesuaian di Tahun 2019		Saldo Akhir 31/12/2019
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6 = (3+4)-5
1	Sekretariat DPRD	25.334.925,00	25.334.925,00	25.334.925,00	25.334.925,00
	Asuransi Kendaraan Dinas dan Gedung - DPRD	25.334.925,00	25.334.925,00	25.334.925,00	25.334.925,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asuransi Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70.248.434,16	13.333.333,33	70.248.434,16	13.333.333,33
	- Sewa Rumah	70.248.434,16	13.333.333,33	70.248.434,16	13.333.333,33
5	KECAMATAN RAPPOCINI	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sewa gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sewa Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DINAS KESEHATAN	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00	0,00
	- Uang muka kerja kegiatan RSUD (BLUD)	51.200.000,00	0,00	-	0,00
	- Uang muka perjalanan dinas RSUD (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Uang muka peningkatan mutu SDM RSUD (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pembayaran dimuka lainnya RSUD (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	146.783.359,16	38.668.258,33	95.583.359,16	38.668.258,33

Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 9*.

7.5.3.1.1.12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp1.367.311.840,01	Rp1.536.522.736,01

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.367.311.840,01 dan sebesar Rp1.536.522.736,01. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi adalah Tuntutan Ganti Rugi yang telah ada SKTJM dan akan jatuh tempo dalam 12 bulan.

Adapun rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada *Lampiran 10*.

7.5.3.1.1.13 Piutang Lainnya	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp60.827.753.653,41	Rp55.943.814.382,32

Piutang Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang belum disetorkan ke Kas Daerah atau dipertanggungjawabkan oleh pihak ketiga sebesar Rp60.827.753.653,41 dengan penyisihan sebesar (Rp8.983.328.565,14) sehingga Piutang Lainnya disajikan netto sebesar Rp51.844.425.088,27, seperti pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 52 Piutang Lainnya

No	Jenis Piutang Lainnya	Saldo Awal 01/01/2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 31/12/2019 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	PT. Pelitagro Mustika Karya	923.484.445,48	0,00	0,00	923.484.445,48
2	PT. Putra-Putra Nusantara	2.267.550.374,00	0,00	0,00	2.267.550.374,00
3	PT. Bank Sulselbar (Sewa ATM)	0,00	244.850.000,00	0,00	244.850.000,00
4	PT. BNI (Sewa ATM)	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5	PT. Dwi Karya Putra	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Fasum/Fasos	580.759.440,00	0,00	0,00	580.759.440,00
8	Piutang Denda Pajak	52.172.020.122,84	4.910.798.776,09	316.709.505,00	56.766.109.393,93
Jumlah		55.943.814.382,32	5.200.648.776,09	316.709.505,00	60.827.753.653,41

Adapun Rincian Piutang Lainnya dan Penyisihannya dapat dilihat pada *Lampiran 11* dan *Lampiran 12*.

- Piutang Lainnya pada PT Pelitagro Mustika Karya (PT PMK) sebesar Rp923.484.445,48 merupakan tunggakan piutang tahun-tahun sebelumnya yang belum disetor yaitu berupa kontribusi dari aset yang dikerjasamakan antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK. Sesuai surat Nomor 005/1350/BKS/XI/2015 tentang rapat evaluasi kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK dalam pengelolaan pusat pergudangan/terminal *cargo*, bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan PT PMK untuk membahas tunggakan piutang kontribusi yang belum terselesaikan.
- Piutang Lainnya pada PT Putra-Putra Nusantara (PPN) sebesar Rp2.267.550.374,00 yang terdiri atas Piutang Royalti sebesar Rp2.002.751.872,00 dan Piutang Denda TA 2012 sebesar Rp264.798.502,00, sehingga total sebesar Rp2.267.550.374,00. Piutang ini merupakan kewajiban kontribusi PT PPN dalam kerjasama pengelolaan Pulau Kayangan untuk TA 2006 s.d. TA 2012. Pada TA 2012, Pemkot Makassar memutuskan kerjasama dengan PT PPN. Sampai dengan saat ini penyelesaian kewajiban piutang royalti masih belum ada perkembangan. Piutang Lainnya pada PT PPN per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.267.550.374,00 dengan penyisihan sebesar Rp2.267.550.374,00 sehingga Piutang PT PPN disajikan netto sebesar Rp0,00.
- Piutang Lainnya pada PT. Bank Sulselbar sebesar Rp244.850.000,00 merupakan Piutang atas Sewa Lahan ATM di Tahun 2019.
- Piutang Lainnya pada PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp45.000.000,00 merupakan Piutang atas Sewa Lahan ATM di Tahun 2019.
- Piutang Lainnya sebesar Rp580.759.440,00, merupakan piutang dana kompensasi sarana pemakaman umum oleh developer atas fasum/fasus pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang sumber obyeknya sudah tidak diketahui.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.3.1.1.14 Piutang BLUD

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp11.446.044.628,00	Rp21.166.004.130,00

Piutang Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Makassar merupakan piutang tahun 2019 sebesar Rp11.446.044.628,00. Piutang tersebut merupakan Piutang BPJS, yang pada tahun 2019 telah terbayarkan sebesar Rp9.719.959.502,00. Rincian piutang BLUD dapat dilihat pada *Lampiran 15*.

7.5.3.1.1.15 Persediaan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp46.822.132.784,81	Rp61.125.063.379,00

Persediaan barang pakai habis/material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi, persediaan barang pakai habis/material terdiri dari Obat-obatan, Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak, Alat Listrik dan Lain-lain. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai dan diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai yang dicantumkan ke dalam neraca daerah.

Persediaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp46.822.132.784,81. Jika dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp61.125.063.379,00 maka Persediaan TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp14.302.930.594,19 atau 23,40%, hal ini disebabkan berkurangnya sisa barang pakai habis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar.

Tabel 53 Saldo Persediaan Per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Jenis Persediaan	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2018 (Rp)
1.	Obat-Obatan	23.861.205.702,81	27.248.315.004,00
2.	ATK	1.324.889.401,00	7.227.311.732,00
3.	Barang Cetak	1.101.262.882,00	274.432.011,00
4.	Alat Listrik	12.058.132.460,00	13.351.675.350,00
5.	Tabung Gas	0,00	0,00
6.	Alat Kontrasepsi	0,00	0,00
7.	Alat Pembersih	42.620.724,00	1.621.374.382,00
8.	Alat Kesehatan	213.551.670,00	288.073.990,00
9.	Alat Bengkel	1.391.825.640,00	1.362.137.461,00
10.	Lain-lain	6.828.644.305,00	9.751.743.449,00
11.	Persediaan Hibah	0,00	0,00
Jumlah		46.822.132.784,81	61.125.063.379,00

Rincian persediaan per jenis dan per OPD disajikan dalam *Lampiran 16*.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.3.1.2 **Investasi Jangka Panjang**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp722.610.453.340,27	Rp740.892.292.395,80

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar dan investasi permanen lainnya.

Saldo Investasi Jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp722.610.453.340,27 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp740.892.292.395,80 yang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

7.5.3.1.2.1 **Investasi Non Permanen**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp10.520.500,00	Rp443.186.850,00

Investasi Non Permanen Lainnya adalah pengeluaran pembiayaan berupa pinjaman kepada kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan permodalan dan perekonomian masyarakat dengan jangka waktu pengembalian lebih dari 1 tahun. Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Makassar merupakan Pinjaman Modal pada Dinas Koperasi dan UKM kepada Koperasi dan Kelompok Usaha Kecil Menengah.

Saldo pinjaman modal per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.520.500,00 berasal dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp443.186.850,00 dikurangi pelunasan pinjaman modal pada tahun 2019 sebesar Rp250.000,00 dan penurunan saldo akibat penggunaan metode NRV sebesar Rp432.416.350,00. Rincian pada *Lampiran 17*.

7.5.3.1.2.2 **Investasi Permanen**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp722.599.932.840,27	Rp740.892.292.395,80

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp722.599.932.840,27 atau mengalami penurunan sebesar Rp18.292.359.555,53 dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp740.892.292.395,80. Diantaranya merupakan penyertaan dalam bentuk



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

saham pada perusahaan swasta sebesar Rp74.300.000.000,00 dan penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp648.299.932.840,27.

Dalam Investasi Permanen yang berupa Penyertaan Modal terhadap Perusahaan Daerah/BUMD Pemerintah Kota Makassar sudah menggunakan *equity method* sehingga nilai investasinya berpedoman dari laba/rugi Perusda/BUMD. Untuk perhitungan nilai investasi atas penyertaan modal Perusahaan Daerah per 31 Desember 2019, berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah *Audited*, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 54 Investasi Permanen

No	Uraian	Saldo Akhir 31/12/2018 (Rp)	Saldo Awal 01/01/2019 (Rp)	Penambahan 2019 (Rp)	Laba /Rugi TA.2019 (Rp)	Pembayaran Dividen TA.2019 (Rp)	Saldo Akhir 31/12/2019 (Rp)
	Metode Biaya						
1	PT. GMTD	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000.000,00
2	PT. KIMA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
3	SULSELBAR	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000.000,00
	Jumlah I	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	74.300.000.000,00
	Metode Ekuitas						
1	PD. Pasar Makassar Raya	194.059.783.004,54	193.352.492.143,00	0,00	1.305.904.206,00	802.874.497,00	193.855.521.852,00
2	PD. Rumah Pemotongan Hewan	4.664.864.781,59	4.664.864.781,59	0,00	0,00	0,00	4.664.864.781,59
3	PD. Terminal Makassar Metro	61.302.386.740,68	61.019.283.272,18	0,00	(152.125.854,87)	0,00	60.867.157.417,31
4	PD. Parkir Makassar Raya	5.973.099.008,45	6.557.737.203,00	0,00	1.030.695.576,00	762.993.082,00	6.825.439.697,00
5	PD. Bank Perkreditan Rakyat	3.809.060.741,93	1.668.600.124,13	3.000.000.000,00	(349.244.349,76)	0,00	4.319.355.774,37
6	PD. Air Minum (PDAM)	446.339.911.268,61	351.048.212.681,50	0,00	38.036.447.453,00	9.920.229.777,00	377.767.593.318,00
	Jumlah II	716.149.105.545,80	618.311.190.205,40	3.000.000.000,00	39.871.677.030,37	11.486.097.356,00	648.299.932.840,27
	Jumlah Total	740.449.105.545,80	642.611.190.205,40	53.000.000.000,00	39.871.677.030,37	11.486.097.356,00	722.599.932.840,27

Penjelasan penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada perusahaan daerah dengan menggunakan Metode Ekuitas diuraikan sebagai berikut. Rincian dapat dilihat dalam *Lampiran 16 dan 17*.

- 1) **PD. Pasar Makassar Raya** **Rp 193.855.521.852,00**
Rincian sebagai berikut:
 - Saldo Awal **Rp 194.059.783.004,54**
 - Penambahan investasi disebabkan laba/rugi tahun berjalan **Rp 1.305.904.206,00**
 - Pengurangan investasi disebabkan penyesuaian ekuitas akhir **Rp (1.510.165.358,54)**

- 2) **PD. Rumah Potong Hewan** **Rp 4.664.864.781,59**
Rincian sebagai berikut:
 - Saldo Awal **Rp 4.664.864.781,59**
 - Penambahan investasi dari laba/rugi tahun berjalan **Rp 0,00**
 - Pengurangan investasi disebabkan adanya laba/rugi tahun berjalan **Rp (0,00)**



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

3) PD. Terminal Makassar Metro	Rp	60.867.157.417,31
Rincian sebagai berikut:		
- Saldo Awal	Rp	61.302.386.740,68
- Penambahan investasi dari laba/rugi tahun	Rp	0,00
- Pengurangan investasi disebabkan adanya laba/rugi tahun berjalan	Rp	(152.125.854,87)
- Pengurangan investasi disebabkan penyesuaian ekuitas akhir	Rp	(283.103.468,50)
4) PD. Parkir Makassar Raya	Rp	6.825.439.697,00
Rincian sebagai berikut:		
- Saldo Awal	Rp	5.973.099.008,45
- Penambahan investasi disebabkan adanya laba/rugi tahun berjalan	Rp	1.030.695.576,00
- Pengurangan investasi disebabkan penyesuaian ekuitas akhir	Rp	(178.354.887,45)
5) PD. Bank Perkreditan Rakyat	Rp	4.319.355.774,37
Rincian sebagai berikut :		
- Saldo Awal	Rp	3.809.060.741,93
- Penambahan investasi disebabkan akumulasi laba/rugi	Rp	(349.244.349,76)
- Pengurangan investasi disebabkan penyesuaian ekuitas akhir	Rp	859.539.382,20
6) PD. Tirta PDAM	Rp	377.767.593.318,00
Rincian sebagai berikut :		
- Saldo Awal	Rp	446.339.911.268,61
- Penambahan investasi disebabkan akumulasi laba/rugi	Rp	38.036.447.453,00
- Pengurangan investasi disebabkan penyesuaian ekuitas akhir	Rp	(106.608.765.403,61)

Penjelasan penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada perusahaan swasta dan perusahaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk

Penyertaan awal pada PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (PT. GMTD Tbk.) yang bergerak pada bidang investasi dan pengembangan *real estate* dan properti dilakukan pada tahun 1991. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2019, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PT GMTD Tbk. adalah sebesar Rp3.300.000.000,00 atau 6,5% dari seluruh modal disetor sedangkan nilai investasinya dengan menggunakan metode biaya. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PT GMTD Tbk. sebesar Rp132.000.000,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

2) PT KIMA

Penyertaan awal pada PT Kawasan Industri Makassar (PT KIMA) yang bergerak pada bidang usaha penyediaan prasarana pembangunan, pengurusan, pengusahaan dan pengembangan serta melakukan kegiatan di bidang kawasan industri dan jasa dilakukan pada tahun 1986. Atas penyertaan awal sebesar Rp4.000.000.000,00. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Kawasan Industri Ujung Pandang tanggal 16 Mei 1988. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PT KIMA sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 10,00% dari seluruh modal disetor sedangkan nilai investasinya dengan menggunakan metode biaya adalah sebesar Rp4.000.000.000,00. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PT KIMA sebesar Rp240.243.464,00.

3) PT Bank Sulselbar

Penyertaan awal pada PT Bank Sulselbar yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dilakukan pada tahun 2015 dengan penyertaan awal sebesar Rp17.000.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2019 nilai penyertaan modal kepada PT Bank Sulselbar adalah sebesar Rp17.000.000.000,00 atau 1,90% dari seluruh modal disetor sedangkan nilai investasinya dengan menggunakan metode biaya sebesar Rp67.000.000.000,00. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar senilai Rp6.367.217.139,00.

4) PD Pasar Makassar Raya

Penyertaan awal pada PD Pasar Makassar Raya (PD PMR) yang bergerak pada bidang pembangunan dan peremajaan pengelolaan pasar tradisional dilakukan pada tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Wilayah Daerah Kota Makassar. Sampai dengan 31 Desember 2019, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD PMR adalah sebesar Rp193.855.521.852,00 atau 100% dari seluruh modal disetor sedangkan penilaian investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PD PMR sebesar Rp802.874.497,00.

5) PD Rumah Potong Hewan

Penyertaan awal pada PD Rumah Potong hewan (PD RPH) yang bergerak pada bidang pemotongan hewan adalah penyediaan daging dan melindungi konsumen, memperbaiki sarana dan prasarana, pengamanan dan keamanan kepada pengusaha dilakukan pada Tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendirian



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sampai dengan 31 Desember 2019, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD RPH adalah sebesar Rp4.664.864.781,59 atau 100% dari seluruh modal disetor sedangkan penilaian investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Makassar tidak menerima deviden dari penyertaan modal pada PD RPH karena merugi. Untuk TB 2019 laporan keuangan PD RPH belum dilakukan audit oleh kantor akuntan publik.

6) PD Terminal Makassar Metro

Penyertaan awal pada PD Terminal Makassar Metro (PD TMM) yang bergerak pada bidang pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan jasa dan sarana serta fasilitas di bidang Terminal dilakukan pada Tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sampai dengan 31 Desember 2019, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD TMM adalah sebesar Rp60.867.157.417,31 atau 100% dari seluruh modal disetor sedangkan penilaian investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Makassar tidak menerima deviden dari PD Terminal Makassar Metro.

7) PD Parkir Makassar Raya

Penyertaan awal pada PD Parkir Makassar Raya (PD PMK) yang bergerak pada bidang pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana parkir dilakukan pada tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sampai dengan 31 Desember 2019, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD PMK adalah sebesar Rp6.825.439.697,00 atau 100% dari seluruh modal disetor. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PD Parkir Makassar Raya sebesar Rp762.993.082,00.

8) PD Bank Perkreditan Rakyat Makassar Sombere'

Penyertaan awal pada PD Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) yang bergerak pada bidang perbankan dilakukan pada Tahun 1996. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan modal pertama sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 2 November 2017 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar menjadi perusahaan perseroaan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar dengan modal dasar menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 dan modal disetor sebesar Rp5.202.382.300,00. Sampai dengan 31 Desember 2019, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD BPR adalah sebesar Rp4.319.355.774,37



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

atau 100% dari seluruh modal disetor. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Makassar tidak menerima deviden dari penyertaan modal pada PD BPR karena PD BPR merugi. Perusahaan yang masih aktif dan merugi ini belum diaudit oleh KAP karena modalnya masih di bawah Rp5.000.000.000,00. Terdapat permasalahan terkait peraturan perbankan karena permodalannya 4% dari ATMR bank minimal 8% dan merupakan Bank Dalam Pengawasan Khusus oleh OJK. PD. BPR saat ini dalam proses peralihan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar.

9) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar

Penyertaan awal pada PD Air Minum (PDAM) yang bergerak pada bidang pelayanan air minum dilakukan pada tahun 1974. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sampai dengan 31 Desember 2019, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PDAM adalah sebesar Rp377.767.593.318,00 atau 96,33% dari seluruh modal disetor. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp9.920.229.777,00.

7.5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp27.034.458.722.847,30	Rp25.445.272.602.925,10

Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Saldo Aset tetap Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp27.034.458.722.847,30 dan Rp25.445.272.602.925,10 yang terdiri dari.

Tabel 55 Mutasi Aset Tetap

NO	ASSET TETAP	SALDO PER 31 Desember 2018	Penyesuaian Saldo Awal		SALDO PER 1 JANUARI 2019
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	23.993.422.804.804,30	0,00	92.412.553.593,00	23.901.010.251.211,30
2	Peralatan dan Mesin	1.346.950.372.809,41	0,00	226.384.108.429,59	1.120.566.264.379,83
3	Gedung dan Bangunan	1.362.148.058.673,74	0,00	121.279.809.505,07	1.240.868.249.168,68
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.265.522.861.235,88	0,00	3.470.389.185,72	5.262.052.472.050,16
5	Aset Tetap Lainnya	75.431.772.389,52	0,00	51.287.783.456,63	24.143.988.932,89
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	218.728.851.207,18	0,00	0,00	218.728.851.207,18
7	Akumulasi Penyusutan	(6.816.932.117.194,95)	0,00	0,00	(6.816.932.117.194,95)
JUMLAH ASET TETAP		25.445.272.603.925,10	0,00	494.834.644.170,01	24.950.437.959.755,20



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

SALDO AWAL 01 Januari 2019	MUTASI TAHUN 2019					PENYESUAIAN AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2019	SALDO AKHIR 31/12/2019
	(LRA TA 2019)	BLUD (PKM)	BLUD (RSUD)	Bertambah	Berkurang		
23.901.010.251.211,30	1.234.902.530,00	0,00	0,00	393.531.533.999,00	305.259.658.305,00	0,00	23.990.517.029.435,40
1.120.566.264.379,83	268.978.239.337	0,00	0,00	76.793.794.520,40	93.248.176.646,48	0,00	1.373.090.121.546,23
1.240.868.249.168,68	171.879.634.304,00	0,00	0,00	55.576.050.849,70	80.543.581.356,41	0,00	1.387.780.352.960,30
5.262.052.472.050,16	416.511.780.032,80	0,00	0,00	157.425.727.107,00	4.564.964.400,00	0,00	5.831.425.014.789,41
24.143.988.932,89	24.613.620.479,00	0,00	0,00	1.579.553.977,99	23.202.737.633,00	0,00	27.134.424.750,38
218.728.851.207,18	0,00	0,00	0,00	64.352.333.239,92	173.198.952.525,73	0,00	109.882.231.921,81
(6.816.932.117.194,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.131.561.664.638,76)	(5.685.370.452.556,19)
25.447.720.895.625,20	883.218.176.682,80	0,00	0,00	749.258.993.694,01	680.018.070.866,62	(1.131.561.664.638,76)	27.034.458.722.847,30

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

7.5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp23.990.517.029.435,40	Rp23.993.422.804.804,30

Saldo Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 milik Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp23.990.517.029.435,40 dan sebesar Rp23.993.422.804.804,30 mengalami penurunan sebesar Rp2.905.775.368,90 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan Tanah dipengaruhi oleh belanja modal dan hibah fasum fasos pada tahun anggaran 2019. Rincian Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 18a**.

Barang milik daerah berupa tanah tercatat sebagai aset tetap sebanyak 4.186 bidang tanah nilai Rp24.082.929.583.028 yang terklasifikasi berdasarkan penggunaannya. Komposisinya sebagian besarnya senilai Rp20.363.763.987.918,00 atau 84,87% merupakan tanah untuk jalan. Pada TA 2016, Pemerintah Kota Makassar melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Tanah Ruang Milik Jalan dan Properti di atas tanah taman. Hasilnya kemudian menambah jumlah bidang dan nilai tanah secara signifikan. Selain dari kegiatan tersebut, tanah jalan juga sebagian merupakan hasil pembebasan lahan melalui kegiatan belanja modal beberapa tahun sebelumnya. Adapun sisanya 15,13% selain dari pada tanah untuk jalan tersebut, sebagian besar merupakan tanah taman di luar perumahan Rp807.209.129.260,00 atau 3,36%. Tercatat beberapa taman yang tersebar di wilayah Kota Makassar. Beberapa taman tersebut diantaranya tidak dalam penggunaan SKPD, misalnya Tanah Taman Tello Baru yang saat ini sedang dalam proses gugatan hukum, Tanah Taman Karunrung di bawah penggunaan Kepolisian, Tanah Jalan Ujung dan Tanah Taman Pualam dalam status pemanfaatan sewa oleh pihak lain, Tanah Taman Karebosi masih dalam ikatan kerjasama pemanfaatan.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tanah untuk bangunan pendidikan/pelatihan dengan total nilai Rp666.980.565.000,00 atau 2,78%. Terdiri dari tanah untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, terdaftar sebagai unit kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar. Selain itu terdapat pula sebidang Tanah Milik Dinas Sosial sebagai tempat pelatihan.

Terdapat diantaranya Tanah fasum fasos dalam kompleks perumahan sebesar Rp391.808.684.180,00 atau 1,63%. Perolehan Tanah fasum fasos tersebut merupakan tanah yang diserahkan oleh sebanyak 12 pihak pengembang perumahan. Saat ini masih terdapat 2 kompleks perumahan yang telah diserahkan tetapi belum dapat disajikan karena belum dilakukan pendataan dan verifikasi rinci terkait jenis properti yang diserahkan, termasuk masih harus menunggu dilakukannya penilaian terhadap asset tersebut sebagai persyaratan dicatat dan disajikan sebagai asset tetap.

Terdapat lima pulau kecil yang dicatat sebagai tanah dalam daftar aset tetap yaitu Pulau Kodingareng, Pulau Barang Lompo, Pulau Lae-Lae, Pulau Samalona, dan Pulau Khayangan. Tanah pulau tersebut total senilai Rp360.674.788.000,00 atau komposisinya 1,50% dari seluruh asset tanah. Pulau Kodingareng merupakan pulau berpenghuni, bahkan sebagian sudah bersertifikat atas nama warga. Demikian pula halnya dengan Pulau Barrang Lompo. Ada beberapa pihak yang meyakini bahwa tercatatnya kedua pulau tersebut secara keseluruhan sebagai aset tanah merupakan kekeliruan, karena merupakan wilayah berpenduduk yang telah turun temurun menetap, bahkan sebelum wilayah tersebut masuk menjadi wilayah administratif Kota Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, serta Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Makassar masih menunggu adanya petunjuk yang jelas tentang penyelesaian pencatatan kedua pulau tersebut. Sedangkan untuk Pulau Lae-Lae dan Samalona, Pemerintah Kota Makassar memiliki bukti kepemilikan yang jelas berupa Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL). Adapun Pulau Kayangan saat ini sedang dalam proses sengketa dengan pihak yang mengelola setelah dilakukan pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan Pulau Kayangan secara sepihak oleh Pemerintah Kota Makassar.

Adapun tanah perkantoran senilai Rp512.168.888.075,00 atau 2,13%, tanah pemakaman Rp473.720.178.000,00 atau 1,97%, Sisanya merupakan tanah bangunan museum, tanah fasilitas umum, tanah pelataran, tanah pembuangan sampah, tanah pengolahan/industri/penyimpanan, tanah perniagaan, tanah perumahan, tanah rumah sakit/puskesmas/klinik, tanah sarana ibadah, dan tanah sarana olahraga, yang masing-masing komposisi nilainya di bawah 1,00%. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**Tabel 56 Klasifikasi Tanah Pemerintah Kota Makassar
Per 31 Desember 2019**

Klasifikasi Tanah	Jumlah Bidang	Nilai	Persentase
Tanah Bangunan Museum	1	11.190.000.000,00	0,05%
Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	264	666.980.565.000,00	2,78%
Tanah Fasilitas Umum	5	16.019.070.000,00	0,07%
Tanah Fasum Fasos Perumahan	309	391.808.684.180,00	1,63%
Tanah Pelataran	1	875.306.000,00	0,00%
Tanah Pemakaman	9	473.720.178.000,00	1,97%
Tanah Pembuangan Sampah	9	91.579.412.020,00	0,38%
Tanah Pengolahan/Industri/Penyimpanan	5	9.096.400.000,00	0,04%
Tanah Perkantoran	190	512.168.888.075,00	2,13%
Tanah Perniagaan	5	47.790.937.734,00	0,20%
Tanah Perumahan	30	181.976.948.950,00	0,76%
Tanah Pulau	5	360.674.788.000,00	1,50%
Tanah Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik	84	56.533.509.668,00	0,24%
Tanah Sarana Ibadah	1	412.500.000,00	0,00%
Tanah Sarana olahraga	1	1.622.500.000,00	0,01%
Tanah Taman Non Perumahan	40	807.209.129.260,00	3,36%
Tanah Untuk Jalan	3227	20.363.763.987.918,00	84,87%
Total	4186	23.993.422.804.805,00	100,00%

Adapun daftar permasalahan Aset Tanah Pemerintah Kota Makassar sampai dengan Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 57 Rincian Progress Penyelesaian Permasalahan
Aset Tanah dan Aset Lainnya**

No	Permasalahan aset	Uraian	Status
1	Tanah tidak bersertifikat	Masih terdapat tanah belum bersertifikat sebanyak 3.936 bidang .Usul Persertifikatan beberapa bidang tanah masih sementara berproses di BPN sebanyak 36 bidang tanah.	Proses
2	Pencatatan pulau-pulau kecil	Terdapat 5 pulau kecil yang dicatat dalam daftar aset tetap (berpengeruni & sebagian bersertifikat an. warga).	Proses
3	Tanah Kampung Nelayan Dinas Kelautan	Aset tanah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan Kota Makassar (DKP3) dikuasai oleh pihak lain.	Proses
4	Tanah Paotere Dinas Kelautan	Sebidang tanah dengan luas 350,00 m2 tercatat pada KIB A (Daftar Inventaris Tanah) OPD DKP3 Kota Makassar, namun kepemilikan tanah tersebut juga diklaim oleh PT PELINDO.	Proses
5	Taman Tello Baru	Sebidang tanah dengan Luas 2.175 m2 Letak Jalan Urip Sumohardjo merupakan aset tanah Taman Tello Baru. Saat ini kepemilikan tanah tersebut	Proses



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Permasalahan aset	Uraian	Status
		diklaim oleh Ahli Waris pemegang hak bersertifikat an. Ishak Kalia.	
6	Taman Pasar Cidu	Sebidang tanah dengan luas 1.500,00 m2 terletak di Jalan Ujung/Jalan Pasar Cidu tercatat pada KIB A (Daftar Inventaris Tanah) OPD Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Atas lahan tersebut berdiri bangunan SPBU milik PT. Karya Dwi Putra (PT KDP) atas perjanjian selama 20 tahun namun tidak mengatur besarnya kompensasi pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kota Makassar berupa nilai kontribusi yang harus dibayarkan oleh PT KDP kepada Pemerintah Kota Makassar.	Proses
7	Taman Karunrung/pos polisi	Sebidang tanah taman dengan Luas 3.430,00 m2 Alamat Jalan Karunrung tercatat pada OPD Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, namun kepemilikan tanah tersebut juga diklaim oleh pihak Polrestabes Makassar karena memiliki dokumen kepemilikan	Proses
8	Pemanfaatan gedung oleh sekolah swasta	Beberapa Lembaga Pendidikan Sekolah Swasta memanfaatkan gedung sekolah milik Pemerintah, dalam hal ini aset gedung Dinas Pendidikan.	Proses
9	Pemanfaatan tanah untuk mesin ATM	Beberapa aset tanah dibangun mesin ATM dari beberapa Bank, namun belum semuanya diterbitkan perjanjian kerjasama pemanfaatan dalam bentuk sewa tanah.	Proses
10	Sebagian tanah eks THR dikuasai oleh pihak lain	Tanah seluas 63.206 m2, alamat Jalan Kerungkerung, Nama Aset Tanah Eks THR yang diperoleh informasi bahwa sebagian dari lahan tersebut dikuasai oleh warga secara tidak sah.	Proses
11	Tanah perumahan karyawan Kecamatan Manggala	Sebidang tanah dengan total Luas 220.790 m2 Lokasi Jalan Kampung Nipa-Nipa Kecamatan Manggala tercatat pada OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar tengah menjadi kawasan hunian/perumahan sebagian akibat pengelolaan lahan oleh Koperasi Beringin untuk dibangun menjadi kawasan perumahan pegawai. Saat ini, di atas lahan tersebut telah banyak terbit sertifikat atas nama pihak lain.	Proses
12	Tanah perumahan karyawan Jalan Rajawali	BPKA mencatat aset tetap tanah rumah dinas seluas 2.880 m2, penduduk yang bertempat tinggal menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan hak milik warga dan kepemilikannya telah lama beralih.	Proses
13	Terdapat tanah fasum fasos yang telah bersertifikat pihak lain	Aset fasum fasos milik Pemkot Makassar atas hasil klarifikasi BPN diketahui bahwa sebanyak 4 bidang tanah telah terbit SHM pribadi.	Proses



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Permasalahan aset	Uraian	Status
14	Tanah dalam status sengketa (bagian hukum) tahun 2017	Terdapat 12 bidang tanah dalam status sengketa dengan pihak ketiga (warga).	Proses
15	Perkembangan status kasus-kasus aset sebelumnya	Terdapat 8 bidang tanah yang belum bersertifikat yang tercatat dalam aset Kota Makassar dan masih dalam proses sengketa di pengadilan.	Proses

Permasalahan aset tetap dan aset lainnya berdasarkan tabel tersebut di atas, diungkapkan secara rinci baik dalam proses penyelesaian maupun yang sudah selesai dalam proses. Rincian pengungkapan ada dalam bagian **Lampiran Pengungkapan Permasalahan Aset** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LKPD TA 2019.

7.5.3.1.3.2 **Peralatan dan Mesin**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp1.373.090.121.546,23	Rp1.346.950.372.809,41

Peralatan dan mesin milik Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp1.373.090.121.546,23 dan sebesar Rp1.346.950.372.809,41. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp26.139.748.736,82 dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai aset tetap peralatan dan mesin tersebut di atas, sebesar Rp12.387.960.414,00 atau 0,90% dari total aset tetap peralatan dan mesin merupakan nilai yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) TA 2019.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 18b**.

7.5.3.1.3.3 **Gedung dan Bangunan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp1.387.780.352.960,30	Rp1.362.148.058.673,74

Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2019 dan 2018 Rp1.387.780.352.960,30 dan sebesar Rp1.362.148.058.673,74. Saldo Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp25.632.294.286,56 dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai aset tetap gedung dan bangunan tersebut di atas, sebesar Rp1.455.646.863,00 atau 0,03% dari total aset tetap gedung dan bangunan merupakan nilai yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) Tahun Anggaran 2019.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 18c**.

Pada aset tetap gedung dan bangunan terdapat penguasaan penggunaannya oleh pihak ketiga yaitu PT. Pelitagro Mustika Karya (PT PMK) yang belum dimasukkan di dalam kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp6.756.120.000,00 karena masih dalam proses revisi/adendum bentuk kerja



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

sama menyangkut penggunaan aset tetap antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK. Rincian bangunan yang dimanfaatkan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 58 Gedung dan Bangunan yang Digunakan Dalam Kemitraan Terminal Kargo

dalam Rupiah

No	Jenis Barang	Bahan	Asal Perolehan	Ukuran Barang	Kondisi/ Satuan	Kondisi	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Gedung Cargo Terminal	Beton	APBD	90	m2	B	1	75.600.000,00
2	Gedung Unit I Cargo Terminal	Beton	APBD	1.440	m2	B	1	1.108.800.000,00
3	Gedung Unit II Cargo Terminal	Beton	APBD	1.440	m2	B	1	1.108.800.000,00
4	Gedung Unit III Cargo Terminal	Beton	APBD	1.440	m2	B	1	1.108.800.000,00
5	Gedung Unit IV Cargo Terminal	Beton	APBD	1.440	m2	B	1	1.108.800.000,00
6	Gedung Unit V Cargo Terminal	Beton	APBD	1.440	m2	B	1	1.108.800.000,00
7	Gedung Unit VI Cargo Terminal	Beton	APBD	1.440	m2	B	1	1.108.800.000,00
8	Mushallah Cargo Terminal	Beton	APBD	24	m2	B	1	18.480.000,00
9	Pos Jaga Terminal	Beton	APBD	12	m2	B	1	9.240.000,00
JUMLAH								6.756.120.000,00

7.5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp5.831.425.014.789,41	Rp5.265.522.861.235,88

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp5.831.425.014.789,41 dan sebesar Rp5.265.522.861.235,88 mengalami peningkatan sebesar Rp565.902.153.553,53 dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada *Lampiran 18d*.

7.5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp27.134.424.750,38	Rp75.431.771.389,52

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp27.134.424.750,38 dan sebesar Rp75.431.771.389,52 mengalami penurunan sebesar Rp48.297.346.639,14 dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada *Lampiran 18e*.

Nilai aset tetap lainnya tersebut di atas, sebesar Rp18.737.108.996,00 atau 68,61% dari total aset tetap lainnya merupakan nilai yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) Tahun Anggaran 2019.

7.5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp109.882.231.921,81	Rp218.728.851.207,18



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

KDP adalah Bangunan milik Pemerintah Kota Makassar yang masih dalam pembangunan/penyelesaian fisik sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp109.882.231.921,81 dan sebesar Rp218.728.851.207,18.

Pengakuan KDP menjadi aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan dilakukan apabila aset tersebut sudah diselesaikan seratus persen dengan penyerahan berita acara pertama atau PHO, dan secara substansi sudah dimanfaatkan Pemerintah Kota Makassar, dapat dilihat pada *Lampiran 18f*.

Pemerintah Kota Makassar menerapkan kebijakan akuntansi batas minimum kapitalisasi dalam penyajian aset tetap. Dengan demikian perolehan aset tetap yang berada di bawah kapitalisasi disajikan dalam *extra comptable* aset dan disajikan sebagai beban lain-lain (*capital expenditure*) pada Laporan Operasional. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 18g*.

7.5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp5.685.370.452.556,19)	(Rp6.816.932.117.194,95)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar (Rp5.685.370.452.556,19) dan sebesar (Rp6.816.932.117.194,95) mengalami penurunan sebesar Rp5.685.370.452.556,19 dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dilihat pada *Lampiran 19*.

7.5.3.1.4 Dana Cadangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp0,00	Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Makassar tidak membentuk Dana Cadangan.

7.5.3.1.5 Aset Lainnya	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp391.109.381.200,22	Rp165.710.712.726,36

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya pada Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp391.109.381.200,22 dan Rp165.710.712.726,36 yang terdiri atas:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 59 Mutasi Aset Lainnya

dalam Rupiah

No.	Uraian	Saldo per 31 Des 2018	Mutasi (Rp)		Saldo Per 31 Des 2019
			Bertambah	Berkurang	
1	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	614.923.500,00	0,00	614.923.500,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	157.439.639.815,00	0,00	0,00	157.439.639.815,00
3	Aset Tak Berwujud	23.926.318.851,00	389.762.300,00	0,00	24.316.081.151,00
4	Akumulasi Amortisasi	(21.460.690.650,00)	(1.285.060.060,00)	0,00	(22.745.750.710,00)
5	Aset Lain-lain	5.805.444.711,47	226.186.107.883,54	507.065.150,29	231.484.487.444,22
Jumlah		165.710.712.726,36	225.905.733.623,54	507.065.150,29	391.109.381.200,22

7.5.3.1.5.1 **Tagihan Penjualan
Angsuran**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp0,00	Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki Tagihan Penjualan Angsuran.

7.5.3.1.5.2 **Tuntutan Ganti Rugi**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp614.923.500,00	Rp0,00

Tuntutan Ganti Rugi adalah Tuntutan Ganti Rugi yang telah ada SKTJM dan akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan.

Tuntutan Ganti Rugi – Aset Lainnya pada Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2019 sebesar Rp614.923.500,00. Daftar Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada *Lampiran 20*.

7.5.3.1.5.3 **Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp157.439.639.815,00	Rp157.439.639.815,00

Merupakan Aset Tetap Pemerintah Kota Makassar pada:

- a. Terminal Regional Daya yang dikelola oleh PT Kalla Inti Karsa (KIK) sebesar Rp15.874.101.000,00

Pembangunan Terminal Regional Daya (TRD) Dilaksanakan oleh PT KIK berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bersyarat (PKS) Nomor 551.22/02/S.Perja/HK tanggal 05 April 1997:

- 1) Pihak Pertama (Pemerintah Kota Makassar) menyediakan modal berupa Lahan di Terminal Regional Daya seluas 12 Ha dengan nilai Rp4.628.754.000,00 dan Tanah serta Bangunan di Eks Terminal Panaikang seluas 32.349 m² dengan nilai Rp11.245.347.000,00;
 - 2) Pihak Kedua (PT KIK) menyediakan modal berupa pembangunan TRD baik sarana dan prasarana sesuai Gambar, Spesifikasi Teknik dan RAB dengan nilai sebesar Rp27.493.526.500,00. Atas pelaksanaan oleh Pihak Kedua sampai dengan 31 Desember 2019, PT KIK belum menyelesaikan pembangunan 157 toko dengan nilai sebesar Rp8.240.324.000,00.
- b. Terminal Cargo yang dikelola oleh PT Pelitagro Mustika Karya sebesar Rp78.869.000.000,00;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- c. Lapangan Karebosi yang dikelola oleh PT Tosan Permai Lestari sebesar Rp58.794.538.815,00;
- d. Taman Pualam yang dikelola oleh H Abdul Latief Makka sebesar Rp1.600.000.000,00; dan
- e. Taman Pasar Cidu dikelola oleh PT Karya Dwi Putra sebesar Rp2.302.000.000,00.

Saldo Akhir Kemitraan Dengan Pihak Ketiga TA 2019 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan TA 2018. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 21*.

7.5.3.1.5.4 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp24.316.081.151,00	Rp23.926.318.851,00

Merupakan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp24.316.081.151,00 adalah aset berupa perangkat lunak atau aplikasi yang ada pada OPD terkait, untuk menunjang kelancaran dalam mengoptimalkan dan mempermudah kerja untuk menghindari *trouble error*.

Pemerintah Kota Makassar menyajikan nilai Akumulasi Amortisasi pada neraca per 31 Desember 2019 sebesar (Rp22.745.750.710,00). Kebijakan penerapan Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Neraca Pemerintah Daerah mulai tahun 2017 dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar.

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dan Amortisasinya dapat dilihat pada *Lampiran 22*.

7.5.3.1.5.5 Akumulasi Amortisasi

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp22.745.750.710,00)	(Rp21.460.690.650,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar (Rp22.745.750.710,00) dan (Rp21.460.690.650,00) mengalami penurunan sebesar (1.285.060.060,00) dibandingkan tahun sebelumnya.

7.5.3.1.5.6 Aset Lain-Lain

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp231.484.487.444,22	Rp5.805.444.710,36

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2019 dengan rincian mutasi sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 60 Mutasi Aset Lain-lain

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2018 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Sisa UYHD	775.151.955,00	0,00	0,00	775.151.955,00
2	Tuntutan Ganti Rugi yang Belum ada Penetapan Pembebanan	81.039.700,00	0,00	566.400,00	80.473.300,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap	4.949.253.055,36	226.186.107.883,54	506.498.749,67	230.628.862.189,22
Jumlah		5.805.444.710,36	226.186.107.883,54	507.065.149,67	231.484.487.444,22

Penjelasan dari masing-masing aset lainnya adalah sebagai berikut.

a. Piutang Sisa UYHD Rp775.151.955,00

Piutang Sisa UYHD adalah saldo sisa UYHD baik Rutin maupun Pembangunan mulai TA 2005 sampai dengan TA 2010 yang belum dikembalikan/dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp775.151.955,00 yang jika dibandingkan dengan Piutang sisa UYHD TA 2018 sebesar Rp775.151.955,00 tidak mengalami perubahan.

b. Tuntutan Ganti Rugi Rp80.473.300,00

Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp80.473.300,00 Nilai tersebut berasal dari reklasifikasi dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi karena masih bersifat informasi yang belum ada pembebanannya.

c. Reklasifikasi dari Aset Tetap Rp230.628.862.162,22

Reklasifikasi aset tetap merupakan aset tetap sampai dengan Desember 2019 yang sudah rusak berat yang dalam proses pengusulan penghapusan.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

7.5.3.2 Kewajiban	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp107.722.354.716,08

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kota Makassar juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota Makassar atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp107.722.354.716,08 dan Rp184.477.439.366,06 yang terdiri dari:

Tabel 61 Kewajiban

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Kewajiban Jangka Pendek	29.100.887.111,74	105.855.971.761,72
2	Kewajiban Jangka Panjang	78.621.467.604,34	78.621.467.604,34
Jumlah		107.722.354.716,08	184.477.439.366,06

7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp29.100.887.111,74	Rp105.855.971.761,72

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Tabel 62 Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	318.013.682,91	240.154.710,71
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	5.146.944.693,83	9.243.306.960,51
5	Utang Beban	17.957.148.026,00	20.495.213.413,00
6	Utang Kepada Pihak Ketiga	5.672.895.709,00	75.871.411.677,50
7	Utang Jangka pendek Lainnya	5.885.000,00	5.885.000,00
Jumlah		28.752.387.111,74	105.855.971.761,72

7.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp318.013.682,91	Rp240.154.710,71

Merupakan utang Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Pada Tahun 2019 Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp318.013.682,91. Rincian mutasi dapat dilihat pada **Lampiran 27**.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.3.2.1.2 Utang Bunga	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp0,00	Rp0,00

Saldo utang bunga Pemerintah Kota Makassar tidak terdapat lagi per 31 Desember 2019.

7.5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp0,00	Rp0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat merupakan kewajiban angsuran pokok yang seharusnya dibayarkan setelah Tahun Anggaran berjalan.

7.5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp5.146.944.693,83	Rp9.243.306.960,52

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp5.146.944.693,83 terdiri dari:

- Pendapatan diterima dimuka berupa retribusi pemakaman sebesar Rp 167.081.269,84;
- Retribusi Ijin Kendaraan Bermotor sebesar Rp 170.154.750,00;
- Retribusi Ijin Gangguan sebesar Rp 3.862.611.024,00;
- Retribusi Ijin Minol Rp 899.583.333,33;
- Retribusi Ijin Trayek Rp 30.014.316,67; dan
- Retribusi Taman Pasar Cidu PT. Karya Dwi Putra Rp 17.500.000,00.

Adapun rincian Pendapatan diterima Dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

7.5.3.2.1.5 Utang Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp17.957.148.026,00	Rp20.495.213.413,00

Utang Beban berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang Beban Pemerintah Kota Makassar tersebut merupakan sisa Utang Beban Tahun sebelumnya sebesar Rp16.407.735.682,00 yang telah terbayar dan penambahan utang beban di tahun berjalan berupa utang listrik, telepon, air, surat kabar dan utang pajak kendaraan bermotor dengan total sebesar Rp1.549.412.344,00, dengan rincian Utang Beban dapat dilihat pada *Lampiran 29*.

7.5.3.2.1.6 Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp5.672.895.709,00	Rp75.871.411.677,50

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Utang kepada Pihak Ketiga Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.672.895.709,00 yang terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan Rp569.736.801,00
- b. Dinas Pekerjaan Umum Rp2.414.154.360,00
- c. Sekretariat Daerah Rp381.440.625,00
- d. Sekretariat DPRD Rp26.727.273,00
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp2.042.650.250,00
- f. Kecamatan Tallo Rp90.090.000,00
- g. Kecamatan Makassar Rp148.096.400,00

Adapun rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada *Lampiran 30*.

7.5.3.2.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp5.885.000,00	Rp5.885.000,00

Merupakan utang belanja Dinas Pendidikan yang belum terbayar sebesar Rp5.885.000,00. Rincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat dalam *Lampiran 31*.

7.5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp78.621.467.604,34	Rp78.621.467.604,34

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang Pemerintah Kota Makassar merupakan utang kepada Pemerintah Pusat yang belum jatuh tempo sampai dengan tahun 2019 yang sudah dilakukan Amandemen Tahun 2013. Atas utang kepada Pemerintah Pusat tersebut saat ini sedang dalam proses administrasi untuk penghapusan mutlak. Posisi utang Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2019, sesuai berita acara Rekonsiliasi Nomor 008/WPB.25/2020 sampai dengan 017/WPB.25/2020 tanggal 9 Januari 2020.

Tabel 63 Kewajiban Jangka Panjang

No.	Jenis Pinjaman	Jumlah (Rp)
1	AMA-470/SLA-12/009	648.973.388,83
2	AMA-472/SLA-833/2013	29.810.883.371,05
3	AMA-471/SLA-159/2013	9.129.376.239,04
4	AMA-169/RDI-185/2013	11.106.120.129,40
5	AMA-166/RDA.P5-115/2013	27.597.167.476,03
6	DEPKEU-17/02/1982	328.947.000,00
Jumlah		78.621.467.604,35

Rincian Kewajiban jangka Panjang dapat dilihat pada *Lampiran 32*.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp28.809.657.359.249,90	Rp26.875.875.904.592,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas sampai dengan per 31 Desember 2019 Rp28.809.657.359.249,90 dan per 31 Desember 2018 Rp26.875.904.592,00. Saldo Ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp1.933.781.454.657,96 dibandingkan Tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

7.5.4.1 Pendapatan – LO

TA 2019	TA 2018
Rp3.831.110.227.244,50	Rp3.724.733.145.474,14

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Makassar dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Tabel 64 Rincian Pendapatan-LO TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.379.092.856.189,64	1.415.032.396.772,14
2.	Pendapatan Transfer	2.186.266.372.711,86	2.142.919.586.050,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	265.750.998.343,00	166.781.162.652,00
	Jumlah	3.831.110.227.244,50	3.724.733.145.474,14

Realisasi Pendapatan - LO tahun 2019 adalah sebesar Rp3.831.110.227.244,50. Masing-masing akun Pendapatan - LO dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TA 2019	TA 2018
Rp1.379.092.856.189,64	Rp1.415.032.396.772,14

Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode TA 2019 PAD pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.379.092.856.189,64 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 65 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.122.231.009.680,57	1.058.652.772.873,41
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	79.824.915.912,92	64.565.443.139,82
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	28.857.897.950,48	92.041.920.511,71
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	148.179.032.645,67	199.772.260.247,20
	Jumlah	1.379.092.856.189,64	1.415.032.396.772,14

Masing-masing realisasi jenis PAD TA 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2019, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2019 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2019. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.122.231.009.680,57 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 66 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2019 dan 2018

Jenis pajak	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Pajak Hotel – LO	120.389.053.350,77	107.133.111.984,17
Pajak Restoran – LO	211.974.081.338,09	167.264.361.510,36
Pajak Hiburan – LO	40.143.071.574,00	47.288.041.089,44
Pajak Reklame – LO	51.777.652.940,00	44.879.531.313,00
Pajak Penerangan Jalan – LO	222.267.797.099,00	212.023.911.244,00
Pajak Pengambilan Tambang Galian Gol. C – LO	0,00	0,00
Pajak Parkir – LO	19.792.315.906,80	18.553.557.317,20
Pajak Air Bawah Tanah – LO	4.282.321.206,00	2.764.086.466,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	33.713.400,00	47.026.000,00
Pajak BPHTB – LO	232.812.018.732,00	210.360.574.161,00
Pajak Bumi dan Bangunan Sek. P2 – LO	218.758.984.133,91	248.338.571.788,24
Perkiraan Penerimaan Melalui Rekanan - LO	0,00	0,00
Pajak Air Permukaan - LO	0,00	0,00
Jumlah	1.122.231.009.680,57	1.058.652.772.873,41

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Makassar dipungut dan dikelola oleh 25 OPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Makassar didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp79.824.915.912,92 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 67 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2019 dan 2018

Jenis Retribusi	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	1.666.298.300,00	2.972.996.350,00
Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus – LO	360.670.000,00	362.345.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	8.247.881.985,56	7.016.062.623,00
Retribusi Pelayanan Alat Pemadam Kebakaran – LO	565.471.500,00	548.802.000,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Jenis Retribusi	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Retribusi I M B – LO	35.939.644.521,00	34.274.449.145,33
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	1.948.923.015,00	1.671.003.317,84
Retribusi Penyeberangan diatas Air – LO	50.000.000,00	28.654.000,00
Retribusi Izin Trayek – LO	44.134.800,00	79.623.800,00
Retribusi Pelayanan Pelayanan/Kebersihan – LO	21.926.156.500,00	14.269.766.783,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO	1.576.791.079,36	608.064.543,65
Retribusi Menara Telekomunikasi - LO	0,00	0,00
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan – LO	1.466.181.000,00	1.264.806.000,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	1.305.000.000,00	1.010.000.000,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian – LO	3.970.776.912,00	0,00
Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	0,00	0,00
Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Tenaga Kerja Asing - LO	566.906.300,00	363.738.540,00
Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal – LO	0,00	95.131.037,00
Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO	190.080.000,00	0,00
Jumlah	79.824.915.912,92	64.565.443.139,82

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Makassar pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dengan realisasi pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp28.857.897.950,48 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 68 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
	Perusahaan Daerah		85.519.472.476,51
1.	PDAM	20.922.052.691,81	82.703.997.915,20
2.	PD. BPR	0,00	0,00
3.	PD. Pasar Makassar Raya	748.484.510,40	1.058.899.541,57
4.	PD. RPH	0,00	0,00
5.	PD. Parkir	447.900.145,27	1.756.575.019,74
6.	PD. Terminal	0,00	0,00
	Perusahaan Pemerintah	22.118.437.347,48	6.416.848.035,00
7.	PT. Bank Sulselbar	6.367.217.139,00	6.246.770.479,00
8.	PT. KIMA	240.243.464,00	170.077.556,00
	Perusahaan Swasta	6.607.460.603,00	105.600.000,00
9.	PT. GMTD	132.000.000,00	105.600.000,00
	Jumlah	28.857.897.950,48	92.041.920.511,51



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode TA 2019 dengan realisasi sebesar Rp148.179.032.645,67 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 69 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO per TA 2019 dan 2018

Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD – LO	61.961.423.135,00	71.827.191.576,00
Pendapatan UPTD Bank Sampah – LO	1.008.047.630,00	2.190.695.400,00
Penerimaan Jasa Giro – LO	10.960.634.284,00	9.190.032.362,00
Penerimaan TP / TGR – LO	8.920.303.573,84	3.629.790.871,34
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	8.689.141.819,92	2.844.139.449,00
Penerimaan dari Pengembalian – LO	11.771.713.316,82	7.899.940.375,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Pajak dan Retribusi	4.594.089.271,09	52.172.020.122,84
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	291.600.000,00	6.950.000,00
Pendapatan Penjualan Tanah - LO	685.264.353,00	479.505.293,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	390.964.000,00	258.744.447,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan – LO	98.310.000,00	267.047.978,00
Pendapatan Bunga Deposito	10.602.739.712,00	21.012.328.623,02
Dana BOS – LO	0,00	0,00
Dana Kapitasi JKN FKTP	28.204.801.550,00	27.993.873.750,00
Jumlah	148.179.032.645,67	199.772.260.247,20

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer

TA 2019	TA 2018
Rp2.186.266.372.711,86	Rp2.142.919.586.050,00

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2019 sebesar Rp2.186.266.372.711,86 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 70 Rincian Pendapatan Transfer – LO TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.824.567.795.448,00	1.808.260.589.494,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	31.415.999.000,00	17.875.000.000,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	330.282.578.263,86	316.783.996.556,00
	Jumlah	2.186.266.372.711,86	2.142.919.586.050,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kota Makassar untuk periode tahun 2019 secara total terealisasi sebesar Rp1.824.567.795.448,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 71 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO
TA 2019 dan 2018**

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	73.049.789.863,00	102.913.565.625,00
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.623.235.530,00	4.366.784.880,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.379.148.200.000,00	1.299.554.321.692,00
4.	Dana Alokasi Khusus	367.746.570.055,00	401.425.917.297,00
	Jumlah	1.824.567.795.448,00	1.808.260.589.494,00

2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya untuk tahun 2019 sebesar Rp31.415.999.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 72 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO
TA 2019 dan 2018**

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
2.	Dana Penyesuaian	31.415.999.000,00	17.875.000.000,00
	Jumlah	31.415.999.000,00	17.875.000.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada tahun 2019 berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp31.415.999.000,00 yang merupakan Dana Penyesuaian untuk insentif daerah.

3. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode tahun anggaran 2019 sebesar Rp330.282.578.263,86 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 73 Rincian Transfer Pemerintah Provinsi – LO
TA 2019 dan 2018**

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	330.282.578.263,86	316.783.996.556,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	330.282.578.263,86	316.783.996.556,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 77.758.599.408,97;
- b. BBN Kendaraan Bermotor sebesar Rp79.389.816.046,00;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp86.444.758.920,00;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT/AP sebesar Rp 953.981.109,00;
- e. Pajak Cukai Hasil Tembakau Rp 237.685.691,00;
- f. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp85.497.737.088,89

Lain-lain	TA 2019	TA 2018
7.5.4.1.3 Pendapatan yang Sah	Rp265.750.998.343,00	Rp166.781.162.652,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp265.750.998.343,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 74 Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	248.086.998.343,00	150.619.436.579,00
2.	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
3.	Pendapatan Lainnya	17.664.000.000,00	16.161.726.073,00
	Jumlah	265.750.998.343,00	166.781.162.652,00

Pendapatan Hibah merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp248.086.998.343,00.

Pendapatan Lainnya sebesar Rp17.664.000.000,00 merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

7.5.4.2 Beban – LO	TA 2019	TA 2018
	Rp2.837.702.740.465,32	Rp3.208.229.355.402,46

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.4.2.1 Beban Pegawai	TA 2019	TA 2018
	Rp1.211.212.085.848,00	Rp1.208.429.551.320,00

Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai - LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2019 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2019.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp1.211.212.085.848,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 75 Rincian Beban Pegawai- LO TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	581.122.068.625,00	557.461.216.472,00
2	Tunjangan Keluarga – LO	47.299.683.480,00	45.831.180.368,00
3	Tunjangan Jabatan – LO	13.733.399.456,00	14.448.097.100,00
4	Tunjangan Fungsional – LO	38.569.333.250,00	38.794.388.900,00
5	Tunjangan Fungsional Umum - LO	8.027.402.500,00	7.596.437.500,00
6	Tunjangan Beras – LO	24.974.862.718,00	25.350.526.573,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	4.366.339.922,00	3.224.993.664,00
8	Pembulatan Gaji – LO	6.451.611,00	7.087.046,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	16.149.615.339,00	15.524.676.709,00
10	Uang Paket – LO	4.769.879.325,00	5.605.173.193,00
11	Tunjangan Badan Musyawarah - LO	213.805.870.000,00	205.529.469.000,00
12	Tunjangan Komisi – LO	1.767.300.000,00	2.070.000.000,00
13	Tunjangan Badan Anggaran - Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	29.247.225,00	32.246.550,00
14	Tunjangan Badan Kehormatan - Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	7.201.425,00	7.856.100,00
15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - Pimpinan dan Anggota DPRD – LO	20.188.350,00	22.106.700,00
16	Tunjangan Perumahan - Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	6.732.500.000,00	6.606.000.000,00
17	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD – LO	199.920.000,00	1.718.518.230,00
18	Tunjangan Asuransi Ketenagakerjaan - LO	1.169.640,00	1.382.940,00
19	Tambahan penghasilan untuk tunjangan kesejahteraan -LO	4.345.200,00	7.242.000,00
20	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja – LO	32.400.000,00	48.947.550,00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas - LO	4.536.000,00	6.852.657,00
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO	58.320.000,00	85.252.500,00
23	Tambahan Penghasilan Guru	1.327.056.442,00	1.284.032.360,00
24	Tunjangan Profesi Guru	300,00	515,00
25	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	1.105.545.000,00	1.085.595.000,00
26	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH – LO	2.026.320.800,00	2.197.402.800,00
27	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	8.746.500.000,00	8.599.500.000,00
28	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Pimpinan dan Anggota DPRD	2.304.162,00	4.443.180,00
29	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - Pimpinan dan Anggota DPRD	27.427.119,00	21.183.120,00
30	Beban Iuran Jaminan Ketenagakerjaan - Pimpinan dan Anggota DPRD	9.093.168,00	8.972.208,00
31	Beban Uang Paket - Pimpinan dan Anggota DPRD	94.636.500,00	93.114.000,00
32	Beban Tunjangan Badan Musyawarah - Pimpinan dan Anggota DPRD	29.247.225,00	31.789.800,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
33	Beban Tunjangan Komisi - Pimpinan dan Anggota DPRD	55.479.900,00	59.925.600,00
34	Beban Uang Jasa Pengabdian - Pimpinan dan Anggota DPRD	349.125.000,00	0,00
35	Beban Penunjang Operasional - Pimpinan dan Anggota DPRD	1.749.111.390,00	366.361.800,00
36	Beban Tunjangan Reses - Pimpinan dan Anggota DPRD	1.425.900.000,00	2.160.900.000,00
37	Beban Tunjangan Transportasi - Pimpinan dan Anggota DPRD	5.510.000.000,00	5.400.000.000,00
38	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	365.400,00	1.339.800,00
39	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	32.900.734.190,00	33.890.578.215,00
40	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166.432.098.500,00	191.338.578.778,00
41	Beban Pegawai Dana BOS	1.433.147.442,00	6.936.899.967,00
42	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.001.950.000,00	988.100.000,00
43	Beban Pegawai BLUD	25.304.009.244,00	23.981.182.425,00
JUMLAH		1.211.212.085.848,00	1.208.429.551.320,00

7.5.4.2.2 Beban Persediaan

TA 2019	TA 2018
Rp238.376.917.060,19	Rp207.834.833.814,89

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp238.376.917.060,19. Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 76 Rincian Beban Persediaan LO TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Beban Persediaan alat tulis kantor	88.517.485.118,00	20.471.361.732,89
2	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender		0,00
3	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	33.388.048.790,00	21.988.792.073,00
4	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.643.675.949,00	7.776.975.440,00
6	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	3.181.100.575,00	2.657.243.075,00
7	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	12.814.160,00	10.078.000,00
8	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	99.147.500,00	122.986.000,00
9	Beban Persediaan plakat dan cenderamata	2.714.805.000,00	2.706.844.325,00
10	Beban Persediaan bendera dan spanduk	2.503.561.300,00	3.177.334.000,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
11	Beban Persediaan hadiah barang	1.046.081.000,00	1.054.946.000,00
12	Beban Persediaan barang persediaan	72.500.000,00	0,00
13	Beban Persediaan rumah tangga	903.746.500,00	462.174.700,00
14	Beban Persediaan bahan baku bangunan	26.777.676.600,00	21.955.225.205,00
15	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	2.601.188.880,00	3.630.408.500,00
16	Beban Persediaan bibit ternak	0,00	108.750.000,00
17	Beban Persediaan bahan obat-obatan	0,00	31.906.528.333,00
18	Beban Persediaan bahan kimia	902.188.995,00	1.086.074.000,00
19	Beban Persediaan bahan material dlm rangka peringatan hari-hari besar	116.764.000,00	154.203.000,00
20	Beban Persediaan bahan material	0,00	0,00
21	Beban Persediaan bahan makanan dan minuman	14.340.223.702,00	15.007.005.916,00
22	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	27.065.746.215,19	44.886.658.002,00
23	Beban Persediaan Cetak	18.823.983.151,00	19.069.566.793,00
24	Beban Persediaan peralatan/perlengkapan pelatihan	19.742.000,00	96.096.000,00
25	Beban Persediaan peralatan/perlengkapan pelatihan/praktek	2.767.491.745,00	3.295.662.100,00
26	Beban Persediaan peralatan/perlengkapan kerja lapangan	541.966.100,00	539.829.000,00
27	Beban Persediaan Alat/Bahan Tanggap Darurat	2.296.171.800,00	909.490.000,00
28	Beban Persediaan bahan pakai habis olahraga	16.250.000,00	47.690.000,00
29	Beban Pesediaan PMKS/Rumah Shelter	199.133.000,00	153.800.000,00
30	Beban Persediaan bahan pakai habis perlengkapan mayat	344.415.000,00	396.720.000,00
31	Beban Persediaan bahan pakai habis pemadam	441.144.000,00	1.110.040.000,00
32	Beban Persediaan bahan material praktek/pratikum	1.078.089.890,00	901.869.200,00
33	Beban bahan habis pakai pengelolaan bank sampah	955.776.090,00	2.138.482.420,00
JUMLAH		238.376.917.060,19	207.834.833.814,89

7.5.4.2.3 Beban Jasa

TA 2019	TA 2018
Rp1.029.107.586.299,41	Rp1.113.952.641.666,67

Beban Jasa adalah Beban Jasa yang meliputi jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet, premi asuransi, sewa, beban makanan dan minuman periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp1.029.107.586.299,41.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.4.2.4 **Beban Pemeliharaan**

TA 2019	TA 2018
Rp48.168.244.571,00	Rp51.119.397.093,00

Beban Pemeliharaan adalah Beban yang meliputi Pemeliharaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp48.168.244.571,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 77 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Beban Jasa Service	0,00	0,00
2	Beban Penggantian Suku Cadang	26.120.504.309,50	27.667.021.334,00
3	Beban Jasa KIR	43.985.000,00	43.043.000,00
4	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	1.913.066.996,00	1.622.103.129,00
5	Beban Pemeliharaan Tanah	811.221.833,00	757.670.650,00
6	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.273.087.164,50	8.488.046.600,00
7	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.917.666.120,00	11.584.166.781,00
8	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.088.713.148,00	957.345.599,00
9	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH		48.168.244.571,00	51.119.397.093,00

7.5.4.2.5 **Beban Perjalanan Dinas**

TA 2019	TA 2018
Rp73.108.354.905,00	Rp80.847.385.191,00

Beban Perjalanan Dinas meliputi Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dimana pada tahun 2019 realisasi Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp73.108.354.905,00 terdiri atas:

- Beban perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp893.179.528,00;
- Beban perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp72.034.011.752,00; dan
- Beban perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp181.163.625,00.

7.5.4.2.6 **Beban Bunga**

TA 2019	TA 2018
Rp0,00	Rp0,00

Beban Bunga adalah Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Tidak terdapat realisasi beban bunga di tahun 2019.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.4.2.7 Beban Hibah

TA 2019	TA 2018
Rp59.811.425.945,00	Rp141.901.940.096,00

Beban Hibah terdiri dari Beban yang akan diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga, Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi, Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat, dan Hibah BOP PAUD masyarakat/swasta yang terjadi pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp59.811.425.945,00, terdiri atas:

Tabel 78 Rincian Beban Hibah Tahun 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.227.965.945,00	4.614.673.516,00
2	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
3	Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	37.486.960.000,00	119.911.666.580,00
4	Beban Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat	5.905.000.000,00	6.385.000.000,00
5	Beban Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	9.549.000.000,00	10.959.600.000,00
6	Beban barang dan jasa dana pendidikan gratis tingkat SD/SMP/SMA/SMK	0,00	0,00
7	Beban barang dan jasa dana kesehatan gratis rumah sakit/Puskesmas	0,00	0,00
8	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	0,00	0,00
9	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31.000.000,00	31.000.000,00
10	Beban Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.611.500.000,00	0,00
	Jumlah	59.811.425.945,00	141.901.940.096

7.5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

TA 2019	TA 2018
Rp2.870.000.000,00	Rp495.618.700,00

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp2.870.000.000,00.

7.5.4.2.9 Beban Penyusutan

TA 2019	TA 2018
Rp113.937.012.152,18	Rp351.774.828.958,09

Beban ini merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain pada tahun 2019 dengan total nilai Beban Penyusutan sebesar Rp113.937.012.152,18 dengan rincian pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 79 Rincian Beban Penyusutan Tahun 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	64.607.387.576,13	157.942.476.146,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.860.752.610,35	26.634.171.742,00
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	45.752.226.744,70	163.297.212.976,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	451.973.115,00	1.589.909.204,09
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.264.672.106,00	2.311.058.890,00
JUMLAH		113.937.012.152,18	351.774.828.958,09

7.5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang

TA 2019	TA 2018
Rp30.246.436.986,90	Rp43.602.977.147,23

Beban Penyisihan Piutang adalah Beban Penyisihan Piutang pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dimana pada tahun 2019 realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp30.246.436.986,90 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 80 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	28.587.665.388,00	35.355.854.191,69
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1.477.388.826,52	2.790.255.508,25
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	181.382.772,38	5.456.867.447,28
JUMLAH		30.246.436.986,90	43.602.977.147,23

7.5.4.2.11 Beban Lain-lain

TA 2019	TA 2018
Rp29.748.092.697,64	Rp5.175.643.415,59

Beban Lain-Lain periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp29.748.092.697,64 meliputi:

- Beban Pakaian Ibadah sebesar Rp 2.580.000,00;
- Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp25.071.630.598,64;
- Beban lain-lain sebesar Rp4.639.734.099,00;
- Beban Tak Terduga sebesar Rp34.148.000,00.

7.5.4.2.12 Beban Transfer

TA 2019	TA 2018
Rp1.116.584.000,00	Rp3.094.538.000,00

Beban Transfer adalah Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp1.116.584.000,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi	TA 2019	TA 2018
	Rp993.407.486.779,18	Rp516.503.790.071,68

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban-LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 81 Rincian Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Pendapatan	3.831.110.227.244,50	3.724.733.145.474,14
2	Beban	2.837.702.740.465,32	3.208.229.355.402,46
Jumlah		993.407.486.779,18	516.503.790.071,68

7.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	TA 2019	TA 2018
	0,00	0,00

Tidak terdapat realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2019.

7.5.4.5 Pos Luar Biasa	TA 2019	TA 2018
	0,00	Rp0,00

Pada tahun 2019 tidak terdapat realisasi Pos luar Biasa baik berupa pendapatan maupun beban luar biasa.

7.5.4.6 Surplus/Defisit – LO	TA 2019	TA 2018
	Rp993.407.486.779,18	516.503.790.071,68

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2019 terdapat surplus sebesar Rp993.407.486.779,18.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

7.5.5.1 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi serta memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

	TA. 2019	TA. 2018
7.5.5.1.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp1.000.265.015.735,41	Rp648.704.994.295,65

Merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

1. Arus Kas Masuk **Rp 3.665.185.451.801,91**

Arus Kas Masuk adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2019.

Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi terdiri dari :

a. Pajak Daerah	Rp	1.067.323.035.833,80
b. Retribusi Daerah	Rp	68.097.361.544,56
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	18.225.557.959,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	Rp	148.495.843.863,58
. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	73.049.789.863,00
f. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Rp	4.623.235.530,00
g. Dana Alokasi Umum	Rp	1.379.148.200.000,00
h. Dana Alokasi khusus	Rp	367.746.570.055,00
i. Dana Penyesuaian	Rp	31.415.999.000,00
j. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	Rp	356.994.230.000,97
k. Hibah	Rp	132.401.628.152,00
l. Dana Darurat	Rp	0,00
m. Bantuan Keuangan	Rp	17.664.000.000,00
n. Pendapatan Lainnya	Rp	0,00
Jumlah	Rp	3.665.185.451.801,91



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

2. Arus Kas Keluar Rp2.664.920.436.066,50

Arus Kas Keluar adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2019, terdiri dari

a. Belanja Pegawai	Rp	1.212.306.922.225,00
b. Belanja Barang	Rp	1.393.040.321.841,50
c. Belanja Bunga	Rp	0,00
d. Belanja Hibah	Rp	55.552.460.000,00
Belanja Hibah		
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.870.000.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.116.584.000,00
g. Belanja Tidak Terduga	Rp	34.148.000,00
h. Belanja Bagi Hasil Pajak	Rp	0,00
Jumlah	Rp	2.664.920.436.066,50

3. Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 1.000.265.015.735,41

7.5.5.1.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

TA. 2019	TA. 2018
(936.028.246.329,80)	(746.306.268.030,09)

Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas dari aktivitas investasi Aset Non Keuangan terdiri dari:

1. Arus Kas Masuk Rp 1.174.538.353,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

a. Pencairan Dana Cadangan	Rp	0,00
b. Pendapatan Penjualan atas Tanah	Rp	685.264.353,00
c. Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	Rp	390.964.000,00
d. Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	Rp	98.310.000,00
e. Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	0,00
f. Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	Rp	0,00
g. Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	Rp	0,00
h. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

i. Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	Rp	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	Rp	1.174.538.353,00

2. Arus Kas Keluar Rp 937.148.089.282,80

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah jumlah pengeluaran kas atas realisasi belanja modal/ pembangunan/investasi dalam TA 2019 dirinci menurut objek belanja sebagai berikut.

a. Tanah	Rp	1.234.902.530,00
b. Peralatan dan Mesin	Rp	268.978.239.337,00
c. Gedung dan Bangunan	Rp	171.879.634.304,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	416.511.780.032,80
e. Aset Tetap Lainnya	Rp	24.613.620.479,00
f. Aset Lainnya	Rp	984.608.000,00
g. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	53.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	Rp	937.202.784.682,80

3. Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp936.028.246.329,80)

7.5.5.1.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	TA. 2019	TA. 2018
	Rp250.000,00	Rp4.350.000,00

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari:

1. Arus Kas Masuk	Rp 250.000,00
Dalam Tahun Anggaran 2018 Penerimaan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan diperoleh dari :	
a. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp 0,00
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp 0,00
c. Penerimaan Kembali Piutang	Rp 250.000,00
d. Penerimaan Sisa UYHD Tahun Lalu	Rp 0,00
e. Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	Rp 0,00
Jumlah	Rp 250.000,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

2. Arus Kas Keluar Rp 0,00

Pengeluaran kas untuk membiayai pengeluaran pendanaan terdiri atas pembayaran angsuran penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, belanja dibayar dimuka, dan pembayaran pokok utang pinjaman dan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	0,00
c. Pembayaran Pokok Pinjaman Jatuh Tempo	Rp	0,00
d. Belanja dibayar dimuka (sisa UYHD)	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

3. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp 250.000,00

7.5.5.1.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

TA. 2019	TA. 2018
Rp318.013.682,91	Rp240.154.711,00

Arus kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang, PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran terdiri dari:

1. Arus Kas Masuk Rp 222.583.018.092,55

Dalam Tahun Anggaran 2019 terdapat Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga berupa pemotongan/pemungutan IWP, Taperum dan PPh 21 serta penyeterannya sebesar Rp222.583.018.092,55

2. Arus Kas Keluar Rp 222.265.004.409,64

Dalam Tahun Anggaran 2019 terdapat pemotongan/pemungutan IWP, Taperum dan PPh 21 serta penyeterannya Rp222.265.004.409,64

3. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp 318.013.682,91



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Kenaikan Bersih Kas 7.5.5.1.5 Selama Periode TA 2019	TA. 2019	TA. 2018
	64.555.033.088,52	(Rp97.356.769.023,44)

Kenaikan terdiri dari:

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	1.000.265.015.735,41
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(936.028.246.329,80)
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	250.000,00
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	318.013.682,91
Jumlah	Rp	64.555.033.088,52

Saldo Akhir Kas terdiri dari:

- Saldo Awal Kas BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran	Rp	175.544.555.882,82
- Saldo Akhir Kas BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran	Rp	240.099.588.971,34
Jumlah	Rp	64.555.033.088,52

Perbandingan saldo akhir kas di BUD antara Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

Saldo Akhir Kas BUD di Neraca	Rp	222.096.474.878,19
Saldo Akhir Kas BUD di Laporan Arus Kas (LAK)	Rp	240.099.588.971,34
Selisih	Rp	18.003.114.093,15

Perbandingan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Laporan Realisasi Anggaran dengan Sisa Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Rp	238.994.035.090,52
Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK)	Rp	240.099.588.971,34
Selisih	Rp	318.013.682,91

Selisih tersebut merupakan Utang PFK per 31 Desember 2019 sebesar Rp318.013.682,91.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

7.5.5.1.1 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Laporan Operasional merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 terdapat saldo awal ekuitas sebesar **Rp26.875.875.904.591,90** merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2018.
2. Surplus/defisit – LO tahun 2019 Pemerintah Kota Makassar sebesar **Rp993.407.486.779,18** merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Pada LPE terdapat selisih sebesar **Rp940.373.966.879,88** hal ini sebagai dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar atas koreksi saldo awal karena kurang atau lebih catat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Koreksi Aset Tetap** per 31 Desember 2019 sebesar (436.362.986.066,08) merupakan mutasi penambahan dan pengurangan dari aset tetap tanah, aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap aset tetap lainnya per 31 Desember 2019, dengan rincian pada OPD sebagai berikut:

Tabel 82 Koreksi Aset Tetap

No	OPD	Koreksi Aset Tetap	
		2019	2018
1	Dinas Pendidikan	(195.097.926.905,37)	(10.334.811.552,32)
2	Dinas Kesehatan	(38.798.564.415,63)	5.336.987.879,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	115.884.242.137,08	(49.052.208.518,72)
4	Dinas Penataan Ruang	(6.443.611.217,50)	0,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(381.534.000,00)	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(1.577.227.000,00)	0,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	(4.012.328.701,00)	(339.576.946,00)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.089.093.625,00)	0,00
9	Dinas Sosial	(1.253.425.001,00)	0,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	(116.514.140,00)	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(328.691.500,00)	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	(457.437.533,33)	3.225.460,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	OPD	Koreksi Aset Tetap	
		2019	2018
13	Dinas Pertanahan	(53.488.072.604,80)	13.500.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	(30.224.782.820,98)	0,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(995.983.502,98)	0,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(3.712.251.965,98)	(222.690.250,00)
17	Dinas Perhubungan	(2.367.590.914,08)	0,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.609.585.705,11)	0,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(1.019.793.100,00)	0,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.925.425.853,54)	0,00
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	(14.777.287.574,75)	(464.307.047,00)
22	Dinas Kebudayaan	(358.390.000,00)	0,00
23	Dinas Perpustakaan	(603.147.814,00)	55.488.000,00
24	Dinas Kearsipan	(374.801.875,00)	(34.499.995,73)
25	Dinas Perikanan dan Pertanian	(10.627.283.025,89)	23.590.000,00
26	Dinas Pariwisata	228.393.696.438,98	0,00
27	Dinas Perdagangan	(13.188.062.699,67)	0,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(2.323.636.971,40)	0,00
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	(317.504.633.062,11)	0,00
30	Badan Pendapatan Daerah	(3.323.327.198,21)	0,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	(3.208.290.012,70)	0,00
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(24.723.333,00)	0,00
33	Sekretariat Daerah	(10.606.805.232,39)	119.899.999,93
34	Sekretariat DPRD	(5.277.943.687,89)	296.888.260,00
35	Inspektorat Daerah	(731.240.000,00)	0,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(25.967.000,00)	0,00
37	Kecamatan Biringkanaya	(14.703.774.129,06)	0,00
38	Kecamatan Bontoala	(1.848.490.394,00)	16.786.000,00
39	Kecamatan Makassar	(1.086.890.001,65)	0,00
40	Kecamatan Mamajang	(3.844.085.574,72)	0,00
41	Kecamatan Manggala	(1.811.707.138,91)	(39.900.000,00)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	OPD	Koreksi Aset Tetap	
		2019	2018
42	Kecamatan Mariso	(2.619.275.063,70)	0,00
43	Kecamatan Panakukang	(5.905.276.898,09)	155.159.000,00
44	Kecamatan Rappocini	(1.230.713.063,80)	0,00
45	Kecamatan Tallo	(1.727.396.558,00)	0,00
46	Kecamatan Tamalanrea	(2.595.738.840,00)	0,00
47	Kecamatan Tamalate	(1.819.971.604,57)	0,00
48	Kecamatan Ujung Pandang	(6.700.579.437,00)	(113.075.000,00)
49	Kecamatan Ujung Tanah	(1.945.162.941,00)	(80.000.000,00)
50	Kecamatan Wajo	(1.082.270.814,33)	0,00
51	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	(2.864.212.190,00)	13.500.000,00
	Jumlah	(436.362.986.066,08)	(54.646.044.710,84)

- b. **Koreksi Penyusutan Aset Tetap** per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.244.234.004.684,94 merupakan selisih penyesuaian nilai penyusutan terkait dengan adanya pengurangan nilai saldo awal Aset Tetap Tahun 2019 dengan rincian pada OPD sebagai berikut:

Tabel 82 Koreksi Penyusutan Aset Tetap

No	OPD	Koreksi Aset Tetap	
		2019	2018
1	Dinas Pendidikan	414.619.150.449,35	0,00
2	Dinas Kesehatan	(12.444.569.879,85)	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	783.576.897.846,11	0,00
4	Dinas Penataan Ruang	5.625.794.628,62	0,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(2.309.879.632,75)	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.113.650.647,96	0,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	(382.573.593,71)	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	918.993.382,31	0,00
9	Dinas Sosial	(545.257.503,41)	0,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	(228.643.210,01)	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(80.341.348,43)	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	86.437.413,94	0,00
13	Dinas Pertanahan	(193.418.746,64)	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	38.108.137.979,23	0,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	105.604.606,34	0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	OPD	Koreksi Aset Tetap	
		2019	2018
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.469.320.059,16	0,00
17	Dinas Perhubungan	(1.584.649.583,67)	0,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.673.044.608,44)	0,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	689.041.224,86	0,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.113.639.023,19	0,00
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	115.576.155,51	0,00
22	Dinas Kebudayaan	93.540.988,59	0,00
23	Dinas Perpustakaan	(60.641.022,55)	0,00
24	Dinas Kearsipan	32.637.653,86	0,00
25	Dinas Perikanan dan Pertanian	2.278.231.706,78	0,00
26	Dinas Pariwisata	(94.025.298,17)	0,00
27	Dinas Perdagangan	(8.017.225.812,12)	0,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.812.952.541,85	0,00
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.955.180.247,85	0,00
30	Badan Pendapatan Daerah	328.240.704,02	0,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	1.956.356.615,64	0,00
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(240.037.724,46)	0,00
33	Sekretariat Daerah	13.970.373.108,80	0,00
34	Sekretariat DPRD	(76.956.267,98)	0,00
35	Inspektorat Daerah	(25.573.783,03)	0,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(195.388.227,28)	0,00
37	Kecamatan Biringkanaya	(40.024.275,18)	0,00
38	Kecamatan Bontoala	556.458.136,00	0,00
39	Kecamatan Makassar	(888.978.987,27)	0,00
40	Kecamatan Mamajang	2.118.331.532,77	0,00
41	Kecamatan Manggala	(556.637.267,90)	0,00
42	Kecamatan Mariso	1.448.711.367,88	0,00
43	Kecamatan Panakukang	(1.037.394.379,05)	0,00
44	Kecamatan Rappocini	(1.314.534.366,39)	0,00
45	Kecamatan Tallo	(458.693.375,32)	0,00
46	Kecamatan Tamalanrea	(353.952.359,42)	0,00
47	Kecamatan Tamalate	(386.667.897,25)	0,00
48	Kecamatan Ujung Pandang	(3.232.079.763,03)	0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	OPD	Koreksi Aset Tetap	
		2019	2018
49	Kecamatan Ujung Tanah	1.599.870.037,91	0,00
50	Kecamatan Wajo	(296.468.280,08)	0,00
51	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	1.258.533.819,80	0,00
Jumlah		1.244.234.004.684,94	0,00

- c. **Koreksi Aset Lainnya** per 31 Desember 2019 sebesar Rp225.501.120.533,86 merupakan penyesuaian nilai Aset Tak Berwujud yang tidak masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar.

Tabel 82 Koreksi Aset Lainnya

No	OPD	Koreksi Aset Tetap	
		2019	2018
1	Dinas Pendidikan	97.174.593.995,64	0,00
2	Dinas Kesehatan	2.545.405.833,63	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	1.504.131.779,53	0,00
4	Dinas Penataan Ruang	103.149.556,11	0,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.796.285,71	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.360.500,00)	0,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	177.137.430,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.858.023,81	0,00
9	Dinas Sosial	825.635.714,29	0,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	(19.050.000,00)	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.659.250,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	(47.734.500,00)	0,00
13	Dinas Pertanahan	53.271.069.523,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	3.542.622.710,38	0,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	43.809.907,50	0,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	540.000,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	386.037.858,98	0,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	(51.510.000,00)	0,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.666.550,00	0,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97.212.441,93	0,00
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	14.330.518.276,04	0,00
22	Dinas Kebudayaan	22.730.725,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan	576.078.670,31	0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	OPD	Koreksi Aset Tetap	
		2019	2018
24	Dinas Kearsipan	9.808.800,00	0,00
25	Dinas Perikanan dan Pertanian	1.583.563.456,29	0,00
26	Dinas Pariwisata	(30.192.500,00)	0,00
27	Dinas Perdagangan	11.877.143.279,33	0,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.120.000,00	0,00
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	9.742.301.451,51	0,00
30	Badan Pendapatan Daerah	25.609.428,57	0,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	(89.770.645,00)	0,00
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00
33	Sekretariat Daerah	768.038.604,29	0,00
34	Sekretariat DPRD	91.784.945,71	0,00
35	Inspektorat Daerah	4.201.250,00	0,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
37	Kecamatan Biringkanaya	12.833.839.545,82	0,00
38	Kecamatan Bontoala	391.531.660,21	0,00
39	Kecamatan Makassar	366.635.326,53	0,00
40	Kecamatan Mamajang	443.329.963,96	0,00
41	Kecamatan Manggala	213.468.229,29	0,00
42	Kecamatan Mariso	241.512.125,71	0,00
43	Kecamatan Panakukang	4.876.736.379,90	0,00
44	Kecamatan Rappocini	69.411.909,77	0,00
45	Kecamatan Tallo	54.767.374,09	0,00
46	Kecamatan Tamalanrea	722.345.503,57	0,00
47	Kecamatan Tamalate	(485.088.249,67)	0,00
48	Kecamatan Ujung Pandang	5.494.568.525,00	0,00
49	Kecamatan Ujung Tanah	255.406.991,01	0,00
50	Kecamatan Wajo	239.959.499,91	0,00
51	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	1.242.088.146,20	0,00
Jumlah		225.501.120.533,86	0,00

d. **Koreksi Pinjaman Modal** per 31 Desember 2019 sebesar (Rp432.416.350,00) merupakan penyesuaian nilai investasi non-permanen berupa pinjaman modal yang menggunakan metode NRV.

e. **Koreksi Investasi** per 31 Desember 2019 sebesar (Rp70.724.852.166,16) merupakan selisih penyesuaian nilai investasi terkait dengan adanya penambahan maupun pengurangan investasi pada perusahaan daerah karena



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

mengalami laba atau rugi pada perusahaan daerah tersebut per 31 Desember 2019 yang dicatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- f. **Koreksi Hutang** per 31 Desember 2019 sebesar (Rp5.632.500.700,68) merupakan koreksi atas pengakuan hutang dan pembayaran hutang pada Tahun Anggaran 2019.
- g. **Koreksi Pendapatan** per 31 Desember 2019 sebesar Rp.16.283.380.000,00 merupakan koreksi atas pengakuan pendapatan Dana Alokasi Umum Tambahan atas selisih pembayaran iuran jaminan kesehatan.



7.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi: 1) Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat); 2) Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintahan Daerah), dan 3) Urusan Pemerintahan Umum (kewenangan Presiden). Pengaturan kriteria pembagian urusan pemerintahan kongkuren dibagi berdasarkan kriteria:

- a. Pemerintah Pusat:
 - 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - 5) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- b. Pemerintahan Daerah Provinsi:
 - 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- c. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Atas perubahan pembagian urusan pemerintahan tersebut, maka terjadi pula perubahan dalam bidang urusan pemerintah daerah, antara lain:

1. Pada Bidang Pendidikan sebelumnya untuk bidang pendidikan menengah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kini kewenangan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi. Dalam Bidang Pendidikan, kewenangan dalam pengelolaan pendidikan terdiri dari enam komponen dan dari komponen tersebut hanya lima komponen yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, pemindahan pendidik, perizinan, dan bahasa dan sastra. Namun kewenangan itupun dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana Pemerintah Daerah Provinsi memiliki lima komponen kewenangan yang terkait pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus,



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

sedangkan Pemerintah kabupaten/Kota memiliki lima komponen kewenangan terkait pendidikan dasar dan non formal.

2. Pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, namun kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah membuat Perda terkait ESDM, pemberian izin (kecuali panas bumi), pembinaan dan pengawasan.
3. Pada Bidang Kelautan sebelumnya juga membagi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, namun kini kewenangan tersebut hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah pelaksanaan kebijakan, penataan ruang laut, pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan, dan perizinan (kecuali ijin usaha perikanan).
4. Pada Bidang Kehutanan yang semula kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah inventarisasi hutan, pengelolaan taman hutan, pertimbangan teknis, dan perizinan.

Dampak dari penarikan kewenangan sebagaimana tersebut di atas berimplikasi luas terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah antara lain:

1. Aspek Kelembagaan
Pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, perubahan struktur organisasi perangkat daerah merupakan hal yang tidak terelakan sebagai dampak dari penarikan kewenangan tersebut. Meskipun tidak mengubah struktur organisasi perangkat daerah, penambahan kewenangan tersebut berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dibawahnya.
2. Peraturan Perundang-undangan
Dengan perubahan kewenangan tersebut maka otomatis akan berdampak pada peraturan perundang-undangan di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memuat kewenangan lama harus segera dicabut. Sedangkan Peraturan Daerah Provinsi yang belum mengakomodir kewenangan baru harus dibuat dan/atau direvisi.
3. Rencana Pembangunan
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentunya telah menyusun rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang 23 tahun 2014 berlaku, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, diperlukan beberapa penyesuaian baik Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, maupun Indikator Kinerja disesuaikan dengan perubahan kewenangan tersebut.



7.7. PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 merupakan hasil konversi dari format menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ke format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Menyangkut kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca ini sebagian besar telah mengacu kepada kebijakan akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar.
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 menggambarkan akun secara umum dan memuat transaksi dalam tahun anggaran ini.
- d. Neraca Daerah ini merupakan bagian berkelanjutan dari Neraca Daerah Tahun Anggaran 2018. Adapun akun-akun neraca yang dijelaskan hanya berkaitan pada pos-pos yang memiliki nilai transaksi dan telah dilakukan komparasi/pembandingan nilai Tahun Anggaran 2019 terhadap Tahun Anggaran 2018 untuk setiap pos-pos akun Neraca Pemerintah Kota Makassar.
- e. Dalam penyusunan Laporan Keuangan ini juga disajikan hasil temuan Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (BPK-RI) dalam rangka pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- f. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan ini akan menjadi informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar maupun pihak internal Pemerintah Kota sendiri dalam rangka pengambilan keputusan.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 9 Juni 2020
Pj. Walikota Makassar

Prof. Dr. Ir. YUSRAN, M.Si